

Pemindahan Paksa dan Kelaparan

Audiensi Publik Nasional, 28-29 Juli 2003



BUKU-BUKU CAVR

Buku-buku tentang Audiensi Publik:

TAHANAN POLITIK
PEREMPUAN DAN KONFLIK
PEMINDAHAN PAKSA DAN KELAPARAN
PEMBANTAIAN
KONFLIK INTERNAL 1974-1976
KEBULATAN TEKAD & KOMUNITAS INTERNASIONAL
ANAK-ANAK DAN KONFLIK

Buku-buku lainnya:

RONA AMI-NIA LIAN (Hear Our Voices)
COMARCA
CHEGA! LAPORAN CAVR
CHEGA! LAPORAN CAVR, Ringkasan Eksekutif

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini diproduksi oleh Tim Produksi dan Unit Terjemahan dengan bantuan dari Tim Arsip, Tim Editor dan Tim Legal. Diurut menurut abjad: *Afonso Aleixo, Aventino de Jesus Baptista Ximenes, Bernadete Jong dos Santos, Celina Martins Fernandes, Darmawan Zaini, Dwi Anggorowati Indrasari, Eleanor Taylor-Nicholson, Emily Chew, Eurico Celestina dos Reis Araujo, Firman Maulana, Fulgençio Aquino Vieira, Galuh Wandita, Germano Boavida da Costa, Gunardi Handoko, Ian White, Istutiah Gunawan-Mitchell, Julião da Costa Cris-tavão Caetano, Julien Poulson, Kieran Dwyer, Kurnia Joedawinata, Lakota Moira, Leyla Safira Assegaf, Luciana Ferrero, Matheos Messakh, Megan Hirst, Melanie Lotfali, Meta Men-donça, Miki Salman, Nugroho Katjasungkana, Phyllis Ferguson, Riamirta Dwiandini, Steve Malloch, Suryono, Titi Irawati, Toby Gibson, Valentina Vincentia, Yulita Dyah Utari.*

CAVR mengucapkan terima kasih kepada para fotografer dan penyumbang foto-foto untuk buku ini: *koleksi foto-foto IOM/Nelson Goncalves, CRS, Peter Rodgers, Toby Gibson, Poriaman Sitanggang.* Foto-foto dari audiensi publik: *Antonio Goncalves, Galuh Wandita, dan Steve Malloch.*

Terima kasih kepada semua donatur CAVR; pemerintah-pemerintah yang disebut berikut ini, perwakilan multilateral dan LSM: *Australia, Australian Business Volunteers, Australian Vol-unteers International, Australian Youth Ambassadors for Development, Australia-East Timor Capacity Building Facility, Catholic Relief Services (Kupang), Denmark, European Commission, Finlandia, Hivos, International Center for Transitional Justice, Irlandia, Jepang, Jerman, Kanada, New Zealand, Norway, Office of the High Commissioner for Human Rights, Portugal, Sweden, UN (lewat UNTAET, UNMISSET dan UNOTIL), UNDP, UNHCR, Inggris, Amerika Serikat, United States Institute for Peace, UN Volunteers, World Bank/Community Empowerment Project.*

© CAVR, 2005. Hak Cipta dilindungi.

www.cavr-timorleste.org

Pemindahan Paksa dan Kelaparan

Daftar Isi

Prakata Audiensi Publik CAVR	4
Kata Pengantar Audiensi Publik mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan	5
Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional	7
Pidato Pembukaan Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR	8
Kesaksian Korban	13
Marito Nicolau dos Reis	14
Manuel Carceres da Costa	17
Merlindi da Conceição	20
Edmundo da Silva	21
Antonio Pires	24
Abilio dos Santos Belo	27
João Sereno	32
Maria José da Costa	34
Francisco Soares Pinto	38
Joana Pereira	40
Rosalina da Costa	43
Kesaksian Ahli	47
Gilman dos Santos	48
Pat Walsh, Mantan Direktur Hak Asasi Manusia, Australian Council for Overseas Aid (ACFOA)	52
Petikan dari wawancara tahun 1980 di Portugal, Pastor Leoneto do Rego	60
Penutupan	63
Pidato Penutupan, Dr. José Ramos-Horta, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama RDTL	64
Daftar Istilah	71

Prakata Audiensi Publik CAVR

Audiensi publik merupakan bagian utama program CAVR untuk memenuhi mandat CAVR sesuai dengan Regulasi 10/2001. Tujuan dari berbagai audiensi publik yang dilakukan oleh CAVR ialah untuk mencari kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi di masa lalu, membantu proses integrasi pelaku kekerasan melalui audiensi publik khusus untuk rekonsiliasi komunitas, dan membantu korban tindak kekerasan memulihkan martabat mereka. Pada saat CAVR dibentuk, ketujuh anggota Komisi Nasional menyatakan tekad mereka untuk mengupayakan sebuah proses yang terbuka dengan partisipasi publik setinggi mungkin sebagai prinsip dasar CAVR. Sebagai tindak lanjut, CAVR merancang suatu program yang melibatkan tim yang menjangkau desa-desa di seluruh Timor-Leste, sambil berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat dan menghargai norma budaya masyarakat setempat. Memberi kesempatan untuk masyarakat untuk berkumpul dan membahas masa lalu secara damai dan menuju rekonsiliasi adalah bagian kunci dari kerja CAVR. Di tingkat nasional, audiensi publik yang disiarkan radio dan televisi ke seluruh penjuru negara, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog tingkat nasional mengenai tindak kekerasan di masa lalu dan membangun masa depan yang berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia. Ke tujuh seri buku ini mencakup audiensi publik dengan tema-tema nasional, yang berhasil diselenggarakan oleh CAVR. Audiensi publik berlangsung di bekas Penjara Balide, yang telah direnovasi dan dijadikan kantor CAVR. Tema-tema nasional tersebut meliputi Tahanan Politik (Februari 2003), Perempuan dan Konflik (April 2003), Kelaparan dan Pemindahan Paksa (Juli 2003), Pembantaian (November 2003), Konflik Internal 1974-76 (Desember 2003), Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional (Maret 2004), dan Anak-anak dan Konflik (Maret 2004).

Sebelum melaksanakan audiensi publik tematis yang disebut diatas, CAVR menyelenggarakan sebuah audiensi nasional untuk korban pelanggaran hak asasi manusia pada bulan November 2002, di bekas kompleks kantor UNAMET dan CNRT di Balide.

Tim CAVR di tingkat distrik juga menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai audiensi publik. Tim distrik bekerja selama tiga bulan di setiap sub-distrik. Sesudah periode kerja dimana tim CAVR mengambil pernyataan tentang pelanggaran yang terjadi pada masa lalu, mengorganisir proses rekonsiliasi di tingkat komunitas, dan melakukan sebuah lokakarya tentang pengalaman pelanggaran yang dialami masyarakat, tim CAVR mengorganisir sebuah audiensi di tingkat sub-distrik untuk korban pelanggaran hak asasi manusia. Lima-puluh dua audiensi korban di tingkat sub-distrik diorganisir oleh CAVR.

Audiensi proses rekonsiliasi komunitas (PRK) merupakan bagian penting dari program CAVR. Sesuai mandat CAVR, tujuan dari audiensi PRK ini adalah untuk membantu mengintegrasikan kembali warga Timor yang melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat mereka sendiri. Sebagian besar pelaku terlibat dalam kekerasan milisi pada tahun 1999. Audiensi PRK diselenggarakan di desa-desa di seluruh distrik di Timor-Leste. Difasilitasi CAVR, proses ini secara inovatif menggabungkan metode resolusi konflik tradisional dengan proses hukum formal. CAVR menyelenggarakan audiensi PRK yang diikuti oleh 1.404 pelaku tindak kekerasan, dan kami memperkirakan lebih dari 40.000 warga masyarakat berpartisipasi dalam audiensi PRK yang diorganisir CAVR.

Sambutan masyarakat terhadap audiensi-audiensi yang diorganisir CAVR sangat antusias. Kami berharap seri buku ini bisa merangsang lebih banyak warga Timor-Leste untuk menceritakan pengalaman mereka di dalam audiensi-audiensi ini..

Kata Pengantar Audiensi Publik mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan

Audiensi Publik Nasional tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan memusatkan pada kelaparan besar pada tahun 1977-79. Inilah periode konflik di mana jumlah terbesar orang Timor-Leste mengalami penderitaan yang besar sekali dan meninggal

Timor-Leste sesungguhnya tertutup selama periode ini, dan kisah-kisah ini sebagian besar belum diungkapkan oleh mereka yang menulis tentang Timor-Leste. Banyak yang meninggal, kematian mereka tidak tercatat, dan mereka yang selamat terus-menerus hidup dalam situasi konflik: korban yang selamat tetap sebagai prioritas utama dan ada kesempatan yang aman untuk membicarakan tragedi nasional ini. Di atas segalanya, Publik Hearing CAVR bertujuan menyediakan sebuah kesempatan yang aman bagi para korban yang selamat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, dan pengalaman dari mereka yang tewas. Hari ini memberi kesempatan kepada rakyat Timor-Leste dan masyarakat internasional untuk mendengar dan belajar dari hari-hari gelap dalam sejarah bangsa ini.

Laporan Akhir CAVR akan merefleksikan penyebab-penyebab dari tragedi ini, dan menarik kesimpulan tentang institusi mana yang memikul tanggungjawab. Publik Hearing ini tidak mencoba menarik kesimpulan-kesimpulan tersebut, tetapi lebih kepada menyatakan secara publik kisah-kisah dari mereka yang memberikan kesaksian. Kesaksian ahli dari para saksi dengan pengalaman dan pengetahuan tertentu tentang peristiwa-peristiwa dari periode ini juga diketengahkan, yang memungkinkan klarifikasi terhadap poin-poin kunci. Hearing ini hanyalah salah satu langkah dari sebuah proses penelitian dan investigasi yang lebih panjang terhadap peristiwa-peristiwa ini dan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan. Penelitian ini dimulai pada tingkat komunitas, dimana tim distrik CAVR mengambil pernyataan dari individu-individu dan melakukan lokakarya di desa-desa untuk memahami dampak peristiwa-peristiwa ini bagi komunitas. Kantor nasional CAVR membentuk sebuah tim peneliti untuk melakukan penelitian khusus menyangkut thema ini. Tim ini melakukan wawancara tokoh-tokoh kunci dan wakil-wakil organisasi-organisasi, mempelajari dokumentasi-dekumentasi dari organisasi-organisasi Timor-Leste, Indonesia dan masyarakat internasional organisations. Tim penelitian ini terdiri dari Diogo Neto Fraga, Abel dos Santos, Gregoriano Fatima dan Gerry Van Klinken.

Secara khusus CAVR menghargai sumbangsih dari Catholic Relief Services (CRS) dalam memberikan sebuah submisi kepada CAVR termasuk dokumentasi kunci dan foto-foto dari periode ini. Kami juga mengucapkan terimakasih atas bantuan fotografer pers Australia Peter Rogers, yang bermurah hati memperbolehkan CAVR untuk mereproduksi foto-fotonya yang diambil selama sebuah perjalanan singkat ke Timor-Leste pada 1979 bersama sebuah kunjungan delegasi Australian. Foto-foto ini mempunyai dampak penting secara internasional pada saat itu; banyak dari foto-foto tersebut direproduksi dalam buku ini.

Para perempuan dan laki-laki yang dipilih untuk memberikan kesaksian pada hearing ini menceritakan pengalaman mereka di delapan distrik termasuk di pulau penjara Ataúro. Kriteria untuk pemilihan ini antara lain termasuk sebisa mungkin mewakili peristiwa kunci, strategi dan tempat yang berkaitan dengan pemindahan dan kelaparan besar dalam tahun-tahun ini. Mereka yang dipilih mau memberikan kesaksian mereka secara terbuka dan merasa bahwa pengalaman tersebut dapat bermanfaat bagi mereka.

Selain mendengarkan secara langsung dari para korban pelanggaran hak asasi, CAVR juga mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, mantan pegawai negeri Indonesia di Timor-Leste dan selanjutnya dengan CRS selama operasi-operasi relief daruratnya; dan dari Pat Walsh dari Australia, yang bekerja dengan LSM Australia selama tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an yang mengusahakan tindakan-tindakan internasional untuk mengurangi kelaparan itu dan mengatasi penyebab-penyebabnya.

Hearing ini sendiri adalah saat yang menyakitkan untuk banyak orang. Mereka yang selamat mengisahkan cerita-cerita tentang kematian massal karena serangan militer dari udara, laut dan darat dan karena kelaparan, kesakitan di gunung-gunung dan di kamp-kamp tahanan. Mereka menceritakan ketidakberdayaan orang-orang biasa dalam konflik. Seluruh anggota keluarga meninggal dan komunitas hancur. Hearing ini menyediakan kar-tasis yang tidak mudah terhadap tragedi semacam ini, tetapi ada perasaan bahwa cerita penting dalam sejarah bangsa telah mulai dituturkan. CAVR berterimakasih kepada para survivor yang berani yang telah bersaksi dalam hearing ini.

CAVR berharap bahwa di tahun-tahun mendatang akan ada peringatan yang tetap terhadap mereka yang tewas dalam kelaparan besar ini, dan program-program pendidikan harus dimulai untuk semua orang Timor-Leste dalam babak paling sulit dalam sejarah kita ini. Harapan kita, buku kecil ini menjadi awal dari sebuah proses berkelanjutan.

Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional



Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa membedakan ras, usia, agama atau pun jenis kelamin, dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Hak-hak ini tidak bisa diberikan, dijual atau direnggut secara paksa. Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang sama, karena mereka manusia.

Gagasan bahwa setiap orang memiliki suatu hak dasar sudah sangat tua dan dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Akan tetapi, doktrin HAM seperti yang kita ketahui sekarang baru dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua. Mengingat kekejaman mengerikan yang dilakukan selama perang itu, pemerintah bangsa-bangsa di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa tak boleh ada seorang pun yang harus menderita seperti itu lagi. Maka pada tanggal 10 Desember 1948, mereka menyepakati Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang menetapkan semua hak-hak dasar manusia. Sejak saat itu, hak-hak ini telah diperluas dan diperbaiki dalam ribuan dokumen internasional dan sekarang terdapat berbagai hukum yang secara ketat mengatur bagaimana cara pemerintah memperlakukan rakyatnya.

Sedihnya, sejarah Timor-Leste antara tahun 1974 dan 1999 dipenuhi dengan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Kita mendengar dalam Audiensi Publik ini tentang penderitaan orang Timor-Leste karena diungsikan dari rumah mereka, baik ke wilayah lain di Timor-Leste atau ke Indonesia. Pindahan paksa berarti bahwa orang kehilangan rumah dan harta milik mereka dan tidak dapat menanam bahan pangan sesuai dengan musim. Juga, sejumlah orang dipindahkan secara paksa ke daerah-daerah yang kurang subur, atau dicegah untuk keluar dari desa-desa mereka atau kamp-kamp mereka untuk mencari makanan. Hal ini berakibat pada kelaparan dan kematian. Ketika membaca kesaksian-kesaksian ini, penting untuk mengingat hak asasi manusia yang dilanggar ketika orang menderita secara demikian. Sejumlah hak-hak ini antara lain:

Hak untuk hidup

Ini adalah yang terpenting dari semua hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk tidak diambil hidupnya, kecuali jika jelas menurut hukum. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan-tindakannya tidak mengakibatkan kematian yang tidak sesuai hukum dari warga negaranya. Dalam situasi perang, adalah tidak benar bagi pihak manapun dari konflik itu untuk membunuh seseorang yang tidak terlibat dalam pertempuran.

Hak atas rumah

Semua orang mempunyai hak terhadap semua rumah di mana mereka dapat hidup aman, damai dan bermartabat. Pemerintah harus mengusahakan perumahan yang memadai bagi setiap orang, dan tidak boleh melakukan apapun yang menyebabkan terambilnya rumah dari pemiliknya, seperti mengusir orang secara paksa. Satu-satunya pengecualian untuk hal ini adalah jika orang-orang diusir demi kesehatan dan keselamatan mereka sendiri

Hak atas makanan

Semua orang mempunyai hak dasar untuk hidup bebas dari kelaparan. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa semua orang mempunyai akses ke makanan pokok yang cukup, memadai dan aman secara gizi. Bahkan ketika dalam situasi perang, berbagai pihak dalam konflik itu mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa warga sipil mempunyai akses ke makanan. Mereka juga tidak boleh mencegah organisasi-organisasi bantuan menyediakan makanan untuk orang-orang.

Hak-hak selama konflik

Menurut hukum-hukum perang internasional, ada aturan tindakan-tindakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil selama konflik itu. Warga sipil (orang-orang yang tidak mengambil bagian secara aktif dalam pertempuran) harus dilindungi dari konflik itu sedapat mungkin. Pihak-pihak yang bertikai dalam konflik tidak diperbolehkan untuk membuat rakyat lapar sebagai bagian dari sebuah taktik perang.

Pidato Pembukaan

Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR

Tema audiensi hari ini sangat penting untuk semua orang Timor-Leste dan masyarakat internasional, karena bahan-bahan yang sudah ada menunjukkan bahwa pemindahan paksa dan kekurangan makanan yang terjadi selama masa konflik politik mengakibatkan kematian sepertiga dari seluruh penduduk Timor-Leste. Jika laporan ini benar, maka dari semua tragedi di masa lalu, ini adalah yang paling buruk, karena menurut perkiraan mengakibatkan kematian ratusan ribuan saudara-saudari kita.

Namun demikian, sebelum CAVR diberi mandat, kita tidak bisa mengumpulkan informasi secara sistematis yang bisa menguji kebenaran dan sekaligus memberikan data terinci tentang laporan-laporan mengenai tragedi ini. Hingga sekarang kami tidak tahu secara pasti apa yang terjadi, dan Komisi pun belum menyusun temuan atau membuat kesimpulan-kesimpulannya. Namun demikian kami bekerja keras dan membuat banyak kemajuan untuk menguak detail-detail periode gelap dari sejarah kita ini.

Kami telah diberi mandat oleh Parlemen Nasional untuk mencari kebenaran agar tindakan berani anggota keluarga kita yang bertahan dalam penderitaan dan yang meninggal bisa mendapat penghormatan. Kita mencari kebenaran agar kita bisa mengajarkan kepada anak dan cucu kita tentang masa lalu karena kita berhasil mengatasi masa sulit, dan kita bisa belajar dari sejarah agar bayangan kelam ini tidak akan menyelimuti negeri kita yang indah. Kita mencari kebenaran agar luka kita di masa lalu bisa disembuhkan, dari pada ditutupi dan terinfeksi, dan meracuni harapan dan upaya kita untuk melangkah ke masa depan. Untuk membangun masa depan yang cerah ini kita memerlukan suatu landasan kuat yang meliputi kebenaran, penerimaan, dan rekonsiliasi. Kita perlu melepaskan diri dari bayangan, tuduhan tak berdasar, desas-desus, dan kebencian, yang akan melemahkan landasan-landasan baru kita, sampai akhirnya landasan kita bisa runtuh karena tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan dari masa depan kita.

Selama dua hari mendatang anda akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang bertahan hidup selama periode tersebut, dan mereka akan bercerita tentang bagaimana pemindahan, kelaparan, dan kematian muncul, penderitaan yang mereka alami, dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Di samping itu, staf CAVR saat ini sedang mengumpulkan informasi tambahan dari berbagai pelosok Timor-Leste. Kami hampir menyelesaikan suatu program pengumpulan informasi dari setiap kuburan di Timor-Leste agar kita tahu, secara pasti, jumlah korban meninggal. Ribuan data yang terkumpul saat ini sedang dimasukkan ke dalam sebuah database di komputer agar kita dapat melakukan analisa. Di dalam database ini juga terdapat ribuan pernyataan yang telah diberikan oleh para saksi kepada kami, yang juga akan memberikan landasan faktual bagi analisis kami.

Bukti-bukti sedang dikumpulkan menyangkut kebijakan, pelaku dan tindakan-tindakan yang terkait dengan peristiwa-peristiwa di atas dan mengapa peristiwa-peristiwa ini dibiarkan terjadi tanpa ada intervensi. Bukti-bukti sedang dikumpulkan untuk menjelaskan apa penyebab-penyebab dari tragedi tersebut dan apakah ada orang atau lembaga yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Juga selama dua hari ini anda akan mendengarkan kesaksian dari saksi ahli yang bisa memberikan informasi terinci mengenai upaya yang dilakukan untuk memberi bantuan kemanusiaan pada saat itu, serta

upaya untuk menarik perhatian internasional untuk masalah ini, dan mengapa perhatian internasional ini tidak dibarengi dengan kecaman internasional.

Tentu saja, pengalaman kita selama tahun 1999 mencakup kelaparan dan pemindahan penduduk secara besar-besaran. Namun demikian, kami hanya mampu memberikan kesempatan kepada sejumlah kecil saksi untuk memberikan kesaksian dan kami telah memutuskan bahwa kesempatan untuk berbicara di hadapan publik ini sebaiknya difokuskan pada periode yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh masyarakat, dimana pemindahan dan kelaparan terkait dengan banyaknya korban yang jatuh. Semua hal yang berkaitan dengan 1999 sangat penting untuk penelitian CAVR dan akan dimasukkan dalam Laporan Akhir dan rekomendasi dari CAVR.

Para saksi selama dua hari ini akan memberikan kesaksian dari periode awal konflik sampai tahun 1985. Anda akan mendengarkan bukti-bukti dari tiga tahap. Empat saksi akan menceritakan pengalaman saat penduduk harus lari ke gunung setelah perang sipil. Mereka juga akan bercerita tentang periode kedua, 1978-1979, saat penduduk dikelompokkan dalam kamp-kamp, dan dua saksi akan berbicara khususnya tentang periode ketiga, 1984-1985, yaitu tentang pemindahan paksa penduduk. Kita juga akan mendengar Gilman dos Santos berbicara tentang peran organisasi non-pemerintah Catholic Relief Services atau CRS selama periode ini. Pat Walsh akan berbicara tentang informasi yang terkumpul dan kerja yang dilakukan oleh aktivis-aktivis dan lembaga-lembaga terkait lain di Australia dan di negeri-negeri lain selama periode ini.

Mandat CAVR mencakup penetapan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan tindakan-tindakan pidana. Kekurangan makanan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan kematian merupakan pelanggaran dua hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan makanan, yang diakui di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Penghancuran sumber makanan, misalnya pembakaran ladang, secara sengaja tidak memberikan makanan kepada kelompok orang, dan pemindahan paksa orang dari sumber makanan yang ada merupakan pelanggaran hukum internasional. Bahkan dalam masa perang, tentara melakukan pelanggaran hukum internasional bila mereka secara sengaja tidak memberikan makanan kepada penduduk sipil. Menurut hukum internasional, tidak memberikan makanan secara sengaja ini merupakan tindak pidana internasional yang berat, meliputi tindak kejahatan terhadap kemanusiaan jika tindakan yang bersangkutan merupakan bagian dari suatu serangan luas yang sistematis terhadap penduduk sipil. Pemindahan paksa penduduk sipil juga merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang punya hak untuk secara bebas bergerak di dalam negerinya sendiri dan juga secara bebas meninggalkan dan kembali ke negerinya. Setiap orang juga punya hak atas rumah. Ketika terjadi pemindahan paksa hak-hak tersebut dilanggar. Menurut hukum internasional situasi yang serius mencakup pemindahan paksa penduduk sipil, jika menyebabkan kematian, penderitaan yang sangat berat atau luka yang berat, juga bisa merupakan pelanggaran berat, termasuk kejahatan terhadap umat manusia.

Pidato Pembukaan Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR

Meskipun CAVR bukanlah suatu pengadilan dan tidak punya wewenang untuk membuat keputusan sebagai pengadilan, mandatnya mencakup suatu penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, hukum kemanusiaan internasional dan hukum pidana. Laporan Akhir kami akan menguraikan semua penelitian dan penyelidikan kami mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional serta memberikan uraian tentang apa yang dialami rakyat kita dari tahun 1974 sampai 1999.

Yang termasuk mandat yang sangat penting dari CAVR adalah mempelajari konteks yang melatar-belakangi pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga kita bisa memberikan sejarah yang lebih akurat yang bisa dijadikan dasar bagi rekonsiliasi antara pihak-pihak dalam konflik. Setiap minggu CAVR mengadakan audiensi rekonsiliasi masyarakat di distrik-distrik seluruh Timor-Leste untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan antara pelaku dan korban perbuatan yang salah di masa lalu. Kami telah menyelesaikan audiensi yang diikuti oleh 300 pelaku, dan kami berharap menyelesaikan audiensi untuk lebih dari 1000 kasus pada akhir mandat kami.

Terakhir, izinkan saya mengucapkan selamat datang dalam audiensi publik ini dan terima kasih atas dukungan dan bantuan semua pihak. CAVR adalah milik rakyat Timor-Leste dan kami tidak akan bisa mencapai tujuan kami tanpa anda semua.

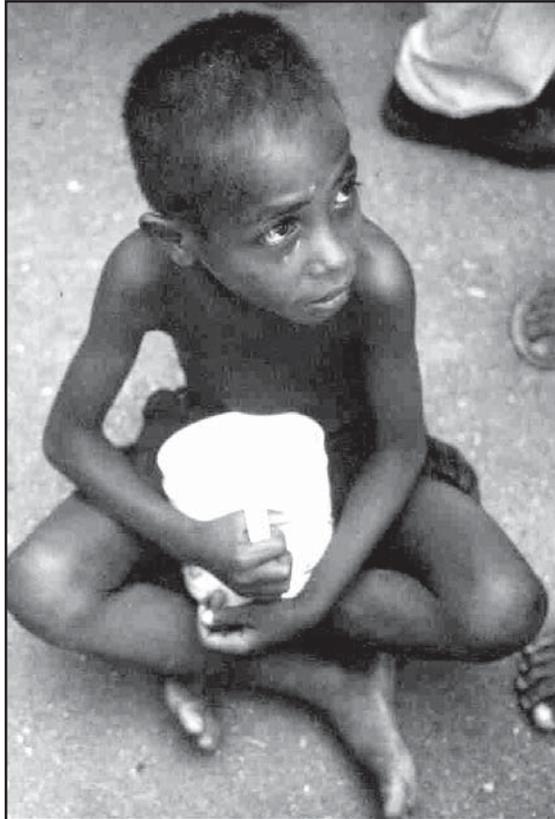


Foto arsip, 1979.



Seorang korban kelaparan di Laga, Baucau, 1979.

Pendahuluan

Kesaksian berikut disajikan sesuai dengan urutan munculnya saksi dalam audiensi. Selama dua hari audiensi, kesaksian korban dilengkapi oleh kesaksian dari saksi ahli, yang disajikan dalam bab terpisah dalam buku ini

Kebanyakan saksi memberikan kesaksian mereka dalam bahasa Tetum, yang merupakan salah satu bahasa resmi Timor-Leste. Versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dari publikasi ini diharapkan dapat menggambarkan secara akurat kesaksian mereka. Setiap paragraf yang ditulis dengan huruf miring adalah pengantar untuk setiap kesaksian yang menjelaskan konteks kesaksian mereka. Kesaksian yang disajikan dalam buku ini diedit dari dokumen yang asli – jadi bukan semata-mata ringkasan, tetapi pernyataan para saksi yang disajikan secara selektif, sambil mempertimbangkan perterjemahannya.

Catatan mengenai kerahasiaan nama para pelaku tindak kekerasan

Pada tahap persiapan penerbitan buku ini, Komisaris Nasional masih memperdebatkan kebijakan CAVR untuk menulis nama-nama pelaku tindak kekerasan dalam Laporan Akhir CAVR. Dalam audiensi publik, para saksi diberi tahu mereka boleh menyebut nama-nama para pelaku tindak kekerasan, tetapi hal tersebut bisa mempunyai dampak hukum. Secara umum, para saksi tidak menyebut nama-nama para pelaku tindak kekerasan selama masa audiensi.

Dalam penerbitan buku ini, nama para pelaku disamarkan dengan huruf abjad 'A'. Apabila ada lebih dari satu pelaku tindak kekerasan, maka identitas mereka diganti dengan huruf abjad 'B', 'C' dan seterusnya.

Kesaksian Korban

Marito Nicolau dos Reis

Distrik Baucau, Dili, Ataúro, dan Penjara Cipinang Jakarta, 1975–1995

Marito Nicolau dos Reis mengatakan bahwa ia adalah anggota Fretilin pada saat invasi Indonesia. Ia bersaksi bahwa pada awalnya ia bekerja untuk perlawanan di hutan dan setelah menyerah bekerja untuk gerakan klandestin di kota-kota. Marito menceritakan bagaimana militer Indonesia mengetahui kegiatan klandestinya dan bagaimana ia ditangkap dan diasingkan ke Ataúro selama 16 bulan. Ia bercerita mengenai penderitaan orang-orang yang dipenjarakan dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara Indonesia di pulau itu. Tidak lama setelah kembali ke Dili, ia kembali giat dalam gerakan klandestin tetapi, katanya, ia tertangkap lagi. Ia mengisahkan bagaimana dirinya diadili di sebuah pengadilan di Dili dan dijatuhi hukuman selama 17 tahun kurungan penjara, dan dibawa ke Penjara Cipinang untuk menjalani hukumannya. Ia dibebaskan pada tahun 1995. Marito menutup kesaksiannya dengan memfokuskan pada perlunya orang Timor-Leste untuk menyadari kekuatan mereka untuk membawa perubahan pada masyarakat Timor-Leste untuk mengatasi warisan perang dan kekerasan serta menumbuhkan kedamaian sejati yang abadi di Timor-Leste.



Revolusi Bunga Anyelir di Portugal membuat pemerintah Portugis memberikan kebebasan kepada semua tanah jajahannya, termasuk Timor-Leste. Menanggapi keadaan ini, rakyat Timor-Leste membentuk kelompok-kelompok dan partai-partai politik. Yang pertama dibentuk adalah UDT, ASDT, Apodeti, Trabalhista, KOTA dan Aditla. Partai yang terakhir tujuannya berintegrasi dengan Australia dan tidak bertahan lama karena kurang dukungan.

Kelompok-kelompok dan partai-partai politik ini kemudian memulai bertengkar di antara mereka sendiri. Intensitas dan kekerasan konflik antar partai mencapai titik yang bisa disebut sebagai perang sipil.

Fretilin semakin menguasai Timor-Leste. Ada kesadaran bahwa invasi Indonesia akan terjadi dan karena itu Fretilin menggunakan kekuatannya untuk bersiap-siap menghadapinya. Fretilin mendorong rakyat Timor untuk pergi ke hutan supaya Fretilin mendapat kesempatan untuk membekali rakyat secara politik dan secara moral untuk perjuangan melawan musuh dan mencegah kematian akibat kelaparan.

Rakyat menuruti Fretilin dan pergi menetap di hutan. Fretilin mempunyai rencana yang menyeluruh untuk administrasi dan instruksi pergerakan, tetapi karena rakyat terpaksa pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, rencana tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya dan akibatnya terjadi kekacauan.

Setelah beberapa waktu Fretilin memutuskan untuk menyuruh rakyat turun dari gunung-gunung, menyerah ke kota, dan membangun gerakan klandestin serta mendukung jaringan bagi para pejuang di hutan. Penduduk sipil dan anggota-anggota Falintil berpartisipasi dalam rencana ini dan pindah ke kota.

Sebagian orang meninggalkan hutan dan menyerahkan diri karena mereka tidak dapat bertahan lagi di gunung-gunung. Saya juga menyerah dan dibawa ke Ostico, Vemasse, Baucau oleh Mayor Iswanto. Karena saya adalah kakak Vicente Reis (Sahe), tentara Indonesia yakin saya dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di hutan dan membawa mereka untuk menyerah. Maka saya dikirim ke hutan untuk mengajak orang-orang itu menyerah, yang memang saya lakukan. Namun saya juga bilang kepada mereka bahwa dengan turun dari gunung mereka bisa mendukung Falintil dengan lebih baik, yaitu dengan bercocok tanam untuk memberi makan kepada para pejuang. Hasilnya, banyak yang menyerah.

Di kota-kota lainnya, kami berusaha untuk membangun gerakan klandestin/klandestin, tetapi saya diawasi ketat oleh musuh karena saya adalah kakak Sahe. Ketika anggota-anggota Falintil tertangkap, beberapa dari mereka dipaksa untuk memberikan informasi mengenai orang-orang klandestin di kota. Akibatnya, saya ditangkap oleh tentara di Ostico dan ditahan di Hotel Flamboyan, Baucau selama tiga hari.

Dari sana tentara Indonesia membawa kami ke pulau Ataúro dimana orang-orang lainnya telah diasingkan. Di Ataúro kami dikurung di dalam sebuah gedung sekolah dasar. Kami didukung oleh masyarakat lokal dan Gereja dan kemudian mendapat bantuan dari Palang Merah Internasional. Salah satu tujuan menahan kami di Ataúro adalah untuk memutuskan hubungan kami dengan Falintil. Semboyan para pejuang adalah “rakyat adalah air dan Falintil adalah ikan.” Kami benar-benar terputus, bahkan dari teman-teman dan keluarga. Ketika kami ditahan di sana, tentara Indonesia melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Saya ditahan di Ataúro selama 16 bulan sebelum dibawa ke Dili. Saya mulai bekerja untuk perwira intelijen Indonesia yang bernama Mayor Williem da Costa. Dengan begitu, saya bisa bebas masuk ke tempat-tempat seperti markas tentara, barak militer, kantor keuangan, dan tempat-tempat lain, tetapi mereka mengawasi untuk mengetahui bagaimana saya menggunakan kesempatan ini. Dengan berjalannya waktu, Mayor Williem mulai mempercayai saya pada sekitar waktu ketika saya memutuskan untuk kembali menjalankan kegiatan klandestin.

Pada tahun 1982-1983 saya adalah tahanan ‘bebas’, tinggal dengan Kasi I Williem da Costa. Pada saat itu kami mengaktifkan kembali gerakan klandestin di Dili. Tidak lama kemudian musuh menjadi curiga dan lima dari kami ditahan. Mereka juga memperingatkan kami untuk tidak melanjutkan kegiatan ini. Pada saat yang sama anggota-anggota gerakan klandestin lainnya ditangkap dan mereka dipaksa untuk mengatakan kepada militer bahwa saya adalah pemimpin mereka di Dili.

Akibatnya saya ditahan lagi. Kemudian saya dibawa ke Bali, Denpasar, Indonesia selama tiga bulan dengan sembilan tahanan lainnya. Selanjutnya saya dikembalikan ke Dili dimana saya dibawa ke SGI di Colmera, Dili untuk interogasi. Di sana saya dipukuli, ditendang, dan diinjak dengan sepatu bot tentara. Kemudian saya ‘diadili’ di Pengadilan Negeri Dili bersama Mariano Bonaparte, David Dias Ximenes dan Albino Lourdes, dan dihukum 17 tahun kurungan penjara di Cipinang, Jakarta.

*Salah satu tujuan
menahan kami
di Ataúro adalah
untuk memutuskan
hubungan kami
dengan Falintil.*

*Semboyan para
pejuang adalah
“rakyat adalah air dan
Falintil adalah ikan.”*

Marito Nicolau dos Reis

Situasi politik, perang saudara, dan pendudukan oleh Indonesia telah memberi kesempatan bagi rakyat Timor-Leste untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Tetapi dengan mengubah keadaan, kita tidak akan mengubah tingkah laku kita kalau kita tidak bisa menghilangkan sifat-sifat yang telah menjadi bagian dari diri kita

Kami diborgol dan dikirim ke Indonesia dalam tiga kelompok yang masing-masing terdiri dari 15 orang. Saya dipenjara di sana sampai tanggal 25 September 1995.

Selain pengalaman saya, saya ingin berbicara mengenai beberapa masalah penting. Situasi politik, perang saudara, dan pendudukan oleh Indonesia telah memberi kesempatan bagi rakyat Timor-Leste untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi dengan mengubah keadaan, kita tidak akan mengubah tingkah laku kita kalau kita tidak bisa menghilangkan sifat-sifat yang telah menjadi bagian dari diri kita ... Jika kita dapat menghilangkannya kita akan dapat hidup dalam kedamaian dan kasih sayang. Tetapi jika tidak, konflik akan berlanjut dan berkembang. Jika kita ingin memperbaiki bangsa kita, kita harus mengubah sifat-sifat dalam diri kita dan kemudian kita bisa saling menerima dan saling membantu. Hanya jika kita bisa berbuat demikian kita bisa memaafkan. Memaafkan seluruh generasi kita. Memaafkan apa yang telah diperbuat sebagai bagian dari perang. Kita masih bisa menjadi diri kita sendiri, sambil mengubah tingkah laku kita.

Misalnya, sesuatu yang saya dengar yang banyak dibicarakan oleh teman-teman dan keluarga saya yang perempuan, adalah kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir untuk mengatasi hal ini kita harus mulai dengan mendefinisikan kasih sayang.

Saya berbicara mengenai ini karena saya ingin membantu Timor-Leste secara fisik dan moral. Oleh sebab itu saya menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa tidak hanya musuh kita yang melakukan kekerasan terhadap kita, tetapi apa yang telah dan masih kita lakukan satu sama lain, termasuk di rumah, adalah kekerasan juga dan harus dihentikan. Harus dihentikan di rumah, di gereja, dan di sekolah-sekolah.

Jika kita tidak memulai, jika kita tidak mendidik diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membuang masalah ini dari masyarakat dan membawa bangsa kita ke depan. Bukan hanya politisi yang memiliki kekuatan. Setiap orang dari kita memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Jika kita dapat menghilangkan sifat-sifat yang saya sebutkan di atas, kita bisa hidup dalam damai, saling menolong, saling mengasihi, saling memperdulikan sesama dan baru setelah itu kita bisa membuat kemajuan.



Pulau Atauro dari Dili.

Manuel Carceres da Costa

Lacló, Distrik Manatuto; Distrik Aileu; Metinaro, Distrik Dili, 1975–1978

Manuel Carceres da Costa sedang berada di Lacló, Distrik Manatuto ketika Indonesia menginvasi Timor-Leste. Ia menceritakan bagaimana ia melarikan diri bersama orang-orang dari komunitas di sekitarnya ke bukit-bukit Hatuconan, Lacló dimana mereka mengatur penyediaan pangan sendiri.

Manuel menceritakan tentang bagaimana komunitasnya dipaksa untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain, karena terancam oleh tentara Indonesia yang terus bergerak maju. Ia menceritakan bahwa militer Indonesia menghancurkan kebun dan sawah, membunuh ternak, sehingga menyebabkan kelaparan. Ia bersaksi mengenai serangan-serangan yang mengerikan oleh pesawat terbang buatan Amerika Serikat OV-10, yang digunakan untuk mengebom dan menembaki penduduk sipil, dan tentang upayanya untuk melarikan diri menghindari serangan-serangan tersebut.

Manuel menceritakan tentang penangkapannya pada bulan Juli 1978, dan pengirimannya ke sebuah kamp konsentrasi di Metinaro dekat Dili. Tanpa makanan yang cukup, banyak orang yang meninggal akibat kelaparan di kamp. Ia menceritakan bagaimana komunitasnya dipindahkan kembali ke Lacló pada akhir 1978, tetapi sekali lagi ditahan di kamp konsentrasi tanpa bisa mendapatkan makanan yang cukup sehingga mengakibatkan kelaparan dan kematian. Pada saat militer Indonesia mengizinkan untuk kembali ke daerah masing-masing, hanya 400 orang dari daerah itu yang masih hidup.

Sebelum Hari Natal, 7 Desember 1975, militer Indonesia (TNI) menyerbu Dili. Orang-orang datang ke Lacló dan memberitahu kami bahwa tentara Indonesia telah masuk ke Dili dan membunuh banyak orang. Mereka mengatakan bahwa tentara Indonesia menggunakan tank-tank dan mengambil harta-benda orang-orang.

Ketika mendengar ini kami memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. Kami berharap negara lain akan mengirimkan bantuan secepatnya, jadi kami tidak takut melarikan diri ke hutan. Sejak tahun 1975 hingga 1976, penduduk Lacló dari wilayah di kedua sisi sungai, tinggal di bukit-bukit Hatuconan.

Ketika kami melarikan diri ke hutan pada bulan Desember, semua orang merasa senang. Saat itu bertepatan dengan panen padi, jadi kami membawa semua beras hasil panen ke hutan sehingga kami tidak mengalami kekurangan pangan. Di hutan kami membentuk dua organisasi: *Organização Popular da Mulher Timorese* (OPMT – Organisasi Rakyat Perempuan Timor) sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Fretilin, dan *Organização Popular Juventude de Timor* (OPJT – Organisasi Rakyat Pemuda Timor) yaitu sebuah organisasi pemuda. Organisasi-organisasi ini membantu kami mengkoordinasi kegiatan di antara masyarakat. Misalnya kami bekerjasama untuk berkebun dan bercocok tanam, dan kami menanam jagung di sekitar kota kecil Lacló. Tentara Indonesia belum mencapai Lacló.

Pada bulan April 1976, musuh mulai memasuki Lacló. Kami cepat berpindah dari Hatuconan ke Idada. Kami tinggal di kamp, yang kami namakan *Beé Maran* (Air Kering). Ketika tinggal di sana orang-orang mulai mengalami kesulitan. Mereka meninggalkan kebun dan sawahnya dan tidak dapat mengambil hasil panen karena musuh akan menyerang mereka.

Situasi menjadi semakin sulit. Pada mulanya masih terdapat banyak pohon sagu jadi kami makan sagu. Tapi karena semakin banyak orang yang melarikan diri ke daerah tersebut, sagu habis dengan cepat. Oleh karena itu kami pindah dari Hatuconan kembali ke kota kecil Lacló. Ketika kami menebang sebuah pohon sagu, datang prajurit Indonesia dan menyerang kami. Mereka berada sekitar lima meter dari kami, tetapi kami



*...kami menguburkan
80 mayat dalam
satu hari. Khususnya
anak-anak dan orang
tua banyak yang mati.*

*Mereka meninggal
karena kelaparan.
Mereka meninggal
dengan perut yang
membengkak dan sakit,
tidak dapat berjalan.*

tidak lari. Ketika tentara menembak seorang anggota Falintil bernama Hermenegildo, kami terpaksa meninggalkan makanan kami dan melarikan diri. Setelah serangan itu militer Indonesia menduduki daerah tersebut sehingga kami tidak dapat kembali lagi. Kerbau-kerbau dan ternak kami semua ditembak mati atau diusir. Kebun-kebun dan sawah kami dihancurkan.

Pada bulan Agustus 1977 ketika kami tinggal di sebuah kamp di Idada kami menguburkan 80 mayat dalam satu hari. Khususnya anak-anak dan orang tua banyak yang meninggal. Mereka meninggal karena kelaparan. Mereka meninggal dengan perut yang membengkak dan sakit, tidak dapat berjalan.

Bulan Mei 1978 situasi menjadi lebih semakin sulit. Musuh mulai menyerang dari perbatasan. Bulan Juli 1978 militer mulai mengepung dan menghancurkan kami dari arah utara di bagian tengah Timor-Leste. Tentara bergerak dari Manatuto, Aileu, dan Laclubar. Jadi kami harus keluar dari Hatuconan dan pindah ke Remexio. Dari Remexio kami lewat Aileu dan kembali ke Hatuconan. Banyak dari kami yang mati di sana karena terluka dan tidak sanggup berjalan lagi. Bayi-bayi yang baru lahir juga meninggal karena kelaparan. Kami tidak punya waktu untuk mengubur yang mati karena musuh mengejar kami. Kami hanya membungkus mereka dengan tikar dan meninggalkan mereka.

Pada siang hari kami bersembunyi. Kami hanya bergerak pada malam hari karena pesawat tempur OV-10 terus mengikuti kami, menembak dan menjatuhkan bom ke arah kami. Banyak teman-teman, keluarga, dan orang-orang lain yang meninggal. Orang juga meninggal karena ranjau. Pesawat tempur OV-10 menembaki penduduk sipil yang tak berdaya di tempat-tempat terbuka. Setiap hari pesawat-pesawat datang dari Baucau pukul sepuluh jadi pada waktu itu kami bersembunyi. Pukul sebelas mereka mulai menghujani kami dengan peluru. Kemudian pada sore hari mereka akan kembali ke Baucau. Ini berlangsung terus-menerus.

Untuk bertahan, kami menyembelih kerbau. Kami tidak tahu punya siapa kerbau-kerbau itu, tapi kami perlu makan. Ketika kami dikepung dan diserang bulan Juli 1978, tak seorang pun dari kami yang menyerah. Kami bersembunyi di Ilimanu, Laclou, Manatuto. Setiap pagi militer Indonesia datang mengebom sehingga kami tidak dapat melarikan diri. Kira-kira ada 20 orang dari kami, termasuk Jacinto Alves yang sekarang menjadi salah seorang Komisaris Nasional CAVR. Akhirnya kami ditangkap oleh tentara dari Batalyon 315. Mereka mencurigai kami sebagai pemimpin di hutan. Kami ditahan di pos komando dan diinterogasi oleh Kapten Mudi. Mereka memeriksa tangan kami dan menanyakan apakah kami memegang senjata di hutan. Kami mengatakan bahwa di hutan kami hanya mengajar.

Militer Indonesia berhenti memukuli kami. Kami tinggal di Ilimanu selama satu hari, dan pada tanggal 21 Juli 1978 kami dibawa ke Kotis dan kami mulai diinterogasi. Kami mengatakan kepada mereka bahwa kami dari seminari, jadi militer Indonesia memerintahkan kami untuk kembali ke Metinaro, Dili. Ketika kami tiba di Metinaro mereka memerintahkan kami untuk berbaris dan mendaftarkan nama kami. Kemudian mereka memberi kami jagung yang telah berjamur, yang seperti tanah, dan kami ditahan di Metinaro. Kami dijaga ketat dan tidak bebas bergerak. Sangat sulit untuk berkebun. Kami harus tetap berada di sekitar Metinaro. Ketika kami berada di kamp konsentrasi di Metinaro banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Mereka tidak memberi kami beras dan tidak ada obat-obatan.

Setelah enam bulan Palang Merah Internasional datang ke Metinaro. Mereka membagikan susu, jagung, beras, dan ikan kaleng. Banyak orang tidak tertolong oleh ini. Ketika kami di hutan kami tidak makan makanan yang asin atau berminyak, sehingga ketika makan ikan kaleng atau minum susu yang dibagikan banyak orang yang tubuhnya bengkak dan mengalami sakit perut. Di dalam kamp konsentrasi tersebut kami mengubur satu atau dua orang setiap hari.

Pada bulan Agustus dan September 1978, pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan dibentuk. Inácio menjadi Camat Lacro. Ia mengajak kami untuk kembali ke kampung kami di Lacro. Bupati juga mengajak kami. Tapi bukannya membawa kami kembali ke Lacro mereka justru menahan kami di Manatuto, dekat jembatan. Kami tinggal di Manatuto selama lebih dari sebulan. Orang-orang mulai meninggal akibat penyakit dan kelaparan. Saya terus meminta kepada militer Indonesia untuk membolehkan kami kembali ke Lacro.

Setelah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, para prajurit membawa kembali orang-orang ke Lacro untuk mempersiapkan tempat tinggal. Pada bulan Oktober kaum perempuan diizinkan untuk kembali ke Lacro. Kami berjalan ke Lacro dengan membawa jagung untuk makanan.

Di Lacro kami menghadapi banyak masalah. Tentara dari Batalyon 405 yang mengawal kami tidak mengizinkan kami untuk kembali ke tanah asal kami. Militer memerintahkan kami untuk tetap tinggal di kamp-kamp konsentrasi di Lacro, yang menyebabkan lebih banyak kematian akibat kelaparan. Dalam satu hari 15-20 orang meninggal. Bagaimana kami bisa mendapatkan makanan kalau kami ditahan di daerah pegunungan yang berbatu-batu? Kami ditahan di kamp konsentrasi selama tiga bulan. Lebih dari 300 orang dari Hatuconan yang meninggal. Setelah banyak orang yang meninggal, militer Indonesia mengembalikan orang-orang ke tanah asalnya. Waktu itu tinggal 400 orang saja yang tersisa.

Saya ingin mengatakan kepada anda semua, khususnya kepada yang berpendidikan, dengarkan mereka yang menderita di masa itu, khususnya para janda dan mereka yang terus mengalami kesulitan hidup. Saya berterima kasih kepada CAVR yang telah mengizinkan kami untuk bercerita tentang masa itu. Bisa berbicara di sini adalah suatu kehormatan, karena banyak yang telah menderita dan meninggal yang tidak dapat hadir di sini.

Ketika kami berada di kamp konsentrasi di Metinaro banyak orang yang meninggal karena kelaparan.

Mereka tidak memberi kami beras dan tidak ada obat-obatan.



Komisaris Nasional CAVR Rev Agostinho Vasconcelos, Wakil Ketua Pastor Jovito de Araujo dan Ketua Aniceto Guterres Lopes.

Merlindi da Conceição

Distrik Liquiça, 1976-1978

Merlindi da Conceicao terpaksa bersembunyi karena invasi Indonesia ke Timor-Leste. Merlindi memberikan kesaksian yang mencekam tentang bagaimana keluarganya harus bersembunyi dari penyerangan besar-besaran militer Indonesia di pegunungan. Dalam jangka waktu dua tahun, menurutnya, nenek, ibu, dan dua orang saudara kandungnya meninggal karena kekurangan pangan dan obat-obatan. Usahnya membantu mereka dengan obat-obat tradisional tidak mendatangkan hasil.



Ketika militer Indonesia mengambil kendali daerah tempat tinggal kami, nenek, ibu, adik perempuan dan laki-laki saya melarikan diri ke hutan di sekitar Tehui, Hatuquesi. Nenek saya, Maria Correia dos Santos yang waktu itu berusia enam puluh tahun, meninggal di sana pada tanggal 5 Mei 1976 karena kekurangan pangan dan obat-obatan. Kami menguburkannya di sana, di tempat persembunyian.

Dua tahun kemudian, pada 1978, ibu saya Domingas da Conceição, yang pada waktu itu berusia 47 tahun, meninggal karena sakit di Darutu, Vatuvou, Maubara, Liquiça. Ia juga telah lama sakit tapi tidak ada obat-obatan. Saya memberikan obat tradisional untuk ibu saya tapi ini tidak banyak membantu. Ia tidak bisa mendapatkan makanan atau obat-obatan karena sedang terjadi invasi militer besar-besaran di desa Hatuquesi.

Satu bulan setelah ibu saya meninggal, adik laki-laki saya, Rosalino da Conceição, yang berusia dua belas tahun, juga meninggal karena kelaparan. Pada saat kematiannya kami sedang bersembunyi di hutan dan hanya memiliki koto tahan (daun kacang) untuk dimakan. Adik laki-laki saya tidak tahan dengan rasa pahit daun itu, sehingga ia jatuh sakit. Saya memberikan obat tradisional yang saya temukan di hutan untuk mengobatinya, tapi hal itu tidak banyak membantu dan ia pun meninggal. Ia dikuburkan di Darutu.

Pada tanggal 26 September 1978, hanya tiga bulan setelah kematian Rosalino, adik perempuan saya Elisa Bete yang baru berusia dua tahun, meninggal di Malaebui, Daru-batla, Maubara. Ia meninggal dengan cara yang sama sebagaimana Rosalino.

*Satu bulan setelah ibu saya meninggal,
adik laki-laki saya, Rosalino da Conceição,
yang berusia dua belas tahun, juga
meninggal karena kelaparan.”*

Edmundo da Silva

Distrik Lautem, 1975-1980

Edmundo da Silva masih sangat muda pada saat terjadinya invasi oleh militer Indonesia. Tahun 1975-1976 komunitasnya tinggal di hutan selama setahun dimana ibunya meninggal akibat serangan jantung dan banyak orang di sekitarnya meninggal akibat kelaparan. Ketika masih kanak-kanak ia bekerja sebagai kurir untuk Fretilin. Ia menceritakan bagaimana pada tahun 1977 penduduk di wilayahnya menyerah dan dibawa ke kamp konsentrasi Sub-distrik Parlamento, Lautem dimana lebih banyak lagi yang meninggal karena sakit dan kelaparan. Menurut kisahnya, pada tahun 1979 mereka diperbolehkan untuk kembali ke desa masing-masing. Namun karena keterlibatannya dalam gerakan klandestin Edmundo dan komunitasnya dipaksa masuk ke kamp konsentrasi di Com, Lautem. Edmundo menceritakan bagaimana penduduk sipil hidup di bawah kontrol ketat militer Indonesia sepanjang dasawarsa 1980-an, dan baru agak mengendur pada dasawarsa 1990-an.

Ketika tentara Indonesia menginvasi Timor-Leste saya masih sangat muda. Kami melarikan diri ke hutan dan tinggal di daerah sekitar Com, di desa Kulur dan Leur, Lautem selama setahun lebih. Keadaan sangat sulit, terutama untuk kami yang tinggal di hutan. Sangat sulit untuk memperoleh makanan. Banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Sebagian ditembak oleh tentara Indonesia, dan ada juga yang meninggal karena jatuh dari pohon.

Ketika di hutan ibu saya meninggal akibat serangan jantung. Pada masa itu saya mendengar bahwa saudara perempuan ibu saya juga telah meninggal. Karena saya masih sangat muda saya tidak diberi senjata. Tetapi saya bekerja sebagai estafeta (kurir) Fretilin untuk Komandan Ijino Pereira dan Anselmo Fernandes.

Pada tahun 1977, sebagian besar orang di wilayah Com dan Asalaino menyerah kepada para serdadu Batalyon 512. Ketika itu saya belum memahami mengapa mereka harus menyerah kepada tentara Indonesia.

Batalyon 512 membawa kami ke pantai di Com dan kami tinggal di sana selama kurang dari seminggu. Kemudian militer Indonesia membawa kami, dan orang-orang dari Lautem, ke desa Parlamento, Moru, Lautem. Kami tinggal di kamp konsentrasi Parlamento selama lebih dari setahun dan sangat menderita. Kami tidak diizinkan untuk pergi lebih dari 100 meter dari kamp. Akibatnya lebih dari 2.000 orang menderita kelaparan. Setiap hari dua sampai lima orang meninggal karena kelaparan. Anak-anak dan orang tua adalah yang paling rentan.

Pada saat kami tinggal di kamp konsentrasi Parlamento, militer Indonesia tidak menyediakan makanan sama sekali. Ketika kami membantu mereka menurunkan beras dari kapal di Lautem, mereka memberi kami satu atau dua kaleng beras. Hanya itu yang menjadi makanan kami. Mereka yang tidak membantu menurunkan beras tidak mendapat apa-apa.

Akibatnya lebih dari 2.000 orang menderita kelaparan. Setiap hari dua sampai lima orang meninggal karena kelaparan. Anak-anak dan orang tua adalah yang paling rentan.

Edmundo da Silva

Para prajurit dan pembantu mereka mulai membakari benda-benda di dalam rumah kami seperti cadangan makanan dan pakaian. Mereka juga menembak mati semua binatang ternak kami.

Pada tahun 1979, setelah banyak orang yang meninggal karena kelaparan dan penyakit, Camat Edmundo da Costa, meminta Batalyon 512 dan 745 untuk membiarkan kami kembali ke desa kami, Muapuso, Vailovaya, dan Lohomata, agar kami bisa bekerja di kebun kami lagi. Waktu itu bulan Agustus yang merupakan awal musim tanam. TNI setuju untuk membiarkan kami pulang. Setelah kami pulang ke desa, kami menanam kebun-kebun dan menggembalakan ternak kami bebas dari pengawasan militer. Kemudian kami mulai memikirkan mereka yang masih berjuang di hutan.

Tahun 1979, ketika Camat Edmundo memerintahkan kami untuk kembali ke desa kami, Xanana Gusmão juga sedang bersembunyi di sekitar Com. Kami berhubungan dengan Xanana di hutan dan mulai membangun gerakan klandestin. Kami mulai membantu Falintil dengan mengirimkan makanan, obat-obatan, dan pakaian kepada mereka yang di hutan, dan dengan mengikuti perintah dari gerakan klandestin, yang kami sebut Ajuda Nan Maran (“membantu dengan daging kering”). Kami terus menjalin hubungan selama tiga bulan.

Para prajurit dari Batalyon 512 dan 745 akhirnya mengetahui jaringan klandestin yang telah kami bangun. Mereka menangkap semua orang dari Muapuso, Vailovaya dan Lohomata. Mereka memaksa kami untuk kembali ke Desa Com. Mereka berkata, “Kalian harus segera kembali ke Com. Disini kalian terus membantu Falintil dan kalau kalian begitu perang tidak akan pernah berhenti.”

Para prajurit dan pembantu mereka mulai membakari benda-benda di dalam rumah kami seperti cadangan makanan dan pakaian. Mereka juga menembak mati semua binatang ternak kami. Mereka memerintahkan kami untuk berjalan ke Com kira-kira 20 kilometer jauhnya dan sepanjang perjalanan ke sana kami dipukuli dan ditendang.

Di kamp konsentrasi di Com kami sangat menderita, bahkan lebih menderita dibandingkan ketika di kecamatan Parlamento. Militer Indonesia tidak membolehkan seorang pun untuk pergi lebih dari 100 meter dari kamp itu. Orang yang melakukannya langsung ditembak mati. Karena ketentuan ini kami tidak bisa memperoleh makanan apapun, dan banyak dari kami yang mati kelaparan.

Banyak saudara kandung dan anggota keluarga saya, termasuk Irmão Virgílio, Oscar, dan Duarte, yang ditangkap oleh tentara dan dibunuh di pantai di Com. Banyak orang yang berasal dari desa Rasa dan Bauro juga ditembak dan dikubur di Com. Para prajurit Batalyon 512 dan 745 mengawasi kami siang malam, di dalam dan di luar kamp. Saya juga menyaksikan tentara menginterogasi seorang anggota keluarga saya, yang suaminya telah mereka bunuh. Tapi saya tidak melihat apa yang mereka lakukan terhadapnya setelah mereka membawanya keluar kamp.

Ketika tinggal di desa Com yang bisa kami makan hanya buah dari pohon asam, yang kami rebus. Sebelum tinggal di kamp, kami tidak tahu-menahu tentang buah asam. Kami mengetahui hal itu ketika kami membersihkan kandang kambing. Waktu itu sudah lebih dari 100 orang meninggal dunia. Kami kekurangan bahan makanan karena kami tidak boleh bercocok tanam. Kami juga dilarang mencari ikan di pantai Tutuala, Lautem. Mereka berkata, “Kalau kalian pergi ke Tutuala kalian akan berhubungan dengan teman-teman kalian di hutan.”

Kami tinggal di desa Com selama enam bulan. Pada tahun 1980 Palang Merah Internasional mulai memberi kami jagung. Makanan ini dibagikan secara langsung oleh Palang Merah Internasional. Kami menerima bantuan mereka hanya tiga kali. Tentara Indonesia mengawasi kami dari bukit-bukit di belakang Com.

Pada tahun 1980 kami mencari apa saja untuk dimakan di kampung halaman kami. Kami tidak dapat ke sana setiap hari karena kami harus mempunyai selembar surat izin dari pos militer. Dalam surat izin itu tercantum tanggal, bulan, dan tahun berlakunya. Kami harus membawanya ketika kami pergi dan menunjukkannya ketika kami kembali. Kami harus pergi bersama dan hanya diberi waktu satu jam. Jika kami datang terlambat kami ditembak. Di kampung asal kami, kami hanya menemukan kelapa dan pisang.

Pada dasawarsa 1990-an kami merasa sedikit lebih bebas. Kami tidak lagi diharuskan membawa surat izin untuk mencari makanan. Kami hanya diawasi oleh tentara dari Batalyon 512 dan 745. Kami keluar dan bercocok tanam di bukit-bukit sekeliling Com dan mencari ikan di pantai di Com. Banyak yang mati ketika kami kembali. Kami menggali kuburan-kuburan baru dan tidak lama kemudian kuburan-kuburan tersebut telah penuh.

*Para prajurit Batalyon
512 dan 745 mengawasi
kami siang malam,
di dalam dan di
luar kamp.*



*Peserta Audiensi Pemindahan
Paksa dan Kelaparan*

Antonio Pires

Desa Mauchiga, wilayah Kablaki, Distrik Ainaro, 1975-1982

Pada 1975 António Pires adalah pendukung Fretilin. Ia menceritakan bagaimana masyarakat desa Mauchiga, yang terletak di pegunungan tengah, mendukung Fretilin, dan pada tanggal 11 Agustus 1975 ketika kudeta UDT sedang berlangsung, UDT tidak dapat memasuki desa tersebut. Menurutnya, ketika militer Indonesia bergerak mendekati Aileu tahun 1976, 7000 orang dari wilayah tersebut melarikan diri ke kaki Gunung Kablaki. Ia menceritakan tentang banyaknya orang yang terbunuh oleh senjata berat dan pemboman dari udara yang memaksanya untuk pindah ke daerah sekitar Alas, Manufahi.

António Pires berbicara mengenai peranannya dalam gerakan klandestin sejak 1979, ketika ia kembali ke daerah Mauchiga. Ia mengisahkan tentang rencana pemberontakan tahun 1982 yang kemudian diketahui oleh militer Indonesia yang melakukan kekejaman yang luar biasa terhadap penduduk Mauchiga. Ia bercerita tentang bagaimana ia melarikan diri ke pegunungan, sementara penduduk sipil dari desa-desa sekitar ditangkap dan disiksa. Ia mengatakan bahwa penduduk desa Mauchiga dipindahkan ke wilayah Dotik, Alas, Manufahi. Ia mengisahkan bagaimana ia kemudian ditangkap dan ditahan selama empat puluh hari. Ia kembali ke keluarganya di Dotik, namun mereka baru bisa pulang ke Mauchiga setahun kemudian.



Tahun 1975 tiga partai datang ke daerah Mauchiga, Distrik Ainaro: UDT, Fretilin, dan Apodeti. Mayoritas penduduk memilih Fretilin karena para pemimpin Fretilin mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kemerdekaan.

Pada tanggal 11 Agustus 1975 terjadi kudeta. Kami membentuk sebuah pusat komando di Lesuati, untuk mendukung perjuangan Fretilin melawan UDT di Ainaro. Setelah kudeta balasan oleh Fretilin, rakyat Mauchiga tidak lari ke hutan karena kami adalah Fretilin. UDT tidak memiliki kekuatan di Mauchiga. Partai Apodeti juga mengirimkan benderanya ke Mauchiga, namun rakyat mengembalikannya ke Apodeti di Ainaro. Kami hanya menginginkan kemerdekaan.

Tahun 1976 setelah tentara Indonesia datang ke Aileu, kami menjadi milisi Fretilin di Mauchiga. Pusat komando kami tetap di Lesuati. Kami bertempur melawan TNI di Aileu. Enam orang teman kami gugur. Kami kembali ke Mauchiga karena kami kalah bertempur dengan TNI. Setelah itu, perang semakin mendekat ke Ainaro. Ketika kami tidak dapat lagi menahan masuknya militer Indonesia, milisi Fretilin Mauchiga dan rakyat Mauchiga melarikan diri ke kaki Gunung Kablaki, di Ainaro. Sekitar 7000 orang bersembunyi di sana.

Ketika musuh sampai di Ainaro kami berusaha menghentikan mereka memasuki kawasan gunung Kablaki. Kami menunggu di tepi setiap sungai dan bertempur melawan mereka. Ini menyulitkan mereka memasuki kawasan itu untuk sementara waktu, tapi kemudian musuh mulai menggunakan senjata berat, tank-tank, tembakan meriam, dan bazooka dari puncak Gunung Flecha, Manumera, dan Bleheto. Pada akhirnya musuh berhasil memasuki wilayah Gunung Kablaki. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari tiga malam dan banyak yang gugur. Tapi kami tetap melawan sehingga musuh tidak dapat memasuki wilayah Kablaki dengan mudah.

Tahun 1977, saudara laki-laki saya yang seorang komandan Fretilin menyerah kepada musuh. Ia pergi bersama musuh menuju ke persembunyian kami dengan pesawat terbang. Setelah ia menunjukkan tempat persembunyian kami kepada mereka, pesawat perang mengebom kami selama tiga hari tiga malam. Akhirnya tempat persembunyian kami hancur. Banyak yang mengalami luka ringan; yang lainnya luka parah dan mati. Setelah itu kami pindah dari kawasan di sekitar Gunung Kablaki ke sekitar Alas.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1979 kami mengadakan pertemuan dengan Komandan Guido/Caribuana, Julio Sarmento dan Asistente Solsole di daerah Buahfu, Alas. Dalam pertemuan tersebut kami memutuskan bahwa saya harus kembali ke daerah sekitar Gunung Kablaki untuk mengorganisir gerakan klandestin.

Ketika saya tiba di kawasan Mauchiga. Saya pergi ke rumah kepala desa, yang kemudian membawa saya ke Koramil di Mauchiga. Koramil menyita dan mengeledah semua barang milik saya dan memerintahkan saya untuk memotong rambut, tetapi saya diizinkan untuk tetap tinggal di Mauchiga. Di Mauchiga, saya mulai mengorganisir gerakan klandestin. Saya mulai melakukan kontak dengan Komandan Venancio Braz dan Mauhunu.

Melalui hubungan ini kami membentuk empat kelompok dengan nama Nafatin, La Ses, Maufehuk dan Cacao. Nama-nama ini mempunyai arti. Kami menamai satu komunitas 'Nafatin' karena perjuangan berlanjut. 'La Ses' artinya tidak menghindari, maknanya kami tidak akan menghindari bahaya atau takut. 'Maufehuk' secara harfiah mengandung arti ubi jalar, tapi digunakan dalam bahasa pergaulan yang artinya 'orang bodoh'. Kami menamai kelompok itu Maufehuk karena tidak ada orang yang pandai di lingkungannya. Semuanya bodoh. 'Cacao' artinya kami harus waspada, karena musuh hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika kelompok-kelompok ini terbentuk, kami membangun sebuah jaringan dalam kelompok Nafatin agar bisa memiliki hubungan dengan seluruh penduduk Mauchiga.

Bulan Agustus 1982, para pemimpin dan sumberdaya Fretilin semakin sedikit dan lemah. Karena itu rakyat Mauchiga melakukan perlawanan untuk membantu mereka.

Militer Indonesia mencurigai kami 'kepala dua,' dan ketika kami mengadakan pertemuan di Ailermale, Mauchiga seorang mata-mata tentara Indonesia hadir dalam pertemuan tersebut. Ia melaporkan rencana kami. Karena itu militer Indonesia menangkap dua belas orang termasuk sekretaris saya dan membawa mereka ke Ainaro. Saya melarikan diri dan bersembunyi dengan komandan perjuangan di tempat persembunyian bernama Sismer dekat Gunung Kablaki.

*Seluruh anggota ...
ditangkap, termasuk
anak-anak dan orang tua.
Mereka dibawa ke Koramil
dimana mereka disiksa
dengan kejam.*

Antonio Pires

*Rakyat Mauchiga
melarikan diri ke kaki
Gunung Kablaki,
di Ainaro. Sekitar 7000
orang bersembunyi
di sana.*

Seluruh anggota dari keempat kelompok yang kami bentuk itu ditangkap, termasuk anak-anak dan orang tua. Mereka dibawa ke Koramil dimana mereka disiksa dengan kejam. Mereka ditelanjangi, dipukuli dengan tongkat, disundut rokok, disetrum, diikat dengan tali, digantung di pohon, ditikam dengan tombak, dibenamkan ke dalam air, dijemu, diperkosa, dan beberapa dikubur hidup-hidup.

Setelah Koramil menyiksa semua anggota kelompok, mereka memindahkan semua orang, termasuk istri dan anak saya, ke desa Dotik di Alas. Satu bulan kemudian tentara mulai melakukan penyerangan di hutan-hutan. Mereka menangkap saya di Gunung Kablaki, tempat selama ini saya bersembunyi bersama Falintil. Tentara membawa dan menghukum saya di Kodim di Same, Manufahi selama 40 hari. Kemudian mereka memerintahkan saya kembali ke desa Dotik dan tinggal dengan keluarga saya. Kami tinggal di Dotik selama satu tahun sebelum dipindahkan kembali ke Mauchiga.



Masyarakat sipil terpaksa melarikan diri menghindari dari serangan dari udara dan laut. Mereka dipaksa berpindah terus-menerus.

Abilio dos Santos Belo

Desa Mauchiga, Distrik Ainaro; Aturo, 1975-1984, 1999

Abilio dos Santos Belo adalah seorang pelajar di Dili ketika Indonesia menyerbu Timor-Leste. Ia memberikan kesaksian mengenai berbagai peristiwa dan pelanggaran yang terjadi sejak tahun 1975 sampai 1999. Setelah invasi ia melarikan diri ke desa Mauchiga. Ia bersaksi tentang bagaimana ia bergabung dengan tentara perlawanan Fretilin dan bagaimana akhirnya militer Indonesia dapat mengatasi perlawanan di Gunung Kablaki, kemudian menangkap dan memaksanya menjadi pengangkut barang untuk militer Indonesia.

Abilio memberikan kesaksian mengenai keterlibatannya dalam perlawanan klandestin dan mengenai penangkapannya pada bulan Juli 1982. Ia menceritakan tentang reaksi militer Indonesia terhadap serangan Falintil pada tanggal 20 Agustus 1982, ketika mereka menumpas penduduk sipil Mauchiga dengan kejam. Ia bercerita bahwa setelah itu ia dan teman-temannya dibawa ke Atauro, dimana mereka ditahan selama dua tahun. Menurut Abilio, keadaannya buruk sekali, tetapi kemudian membaik setelah mereka dikunjungi oleh Palang Merah Internasional. Abilio menceritakan bagaimana pada tahun 1984 mereka dikembalikan ke Distrik Ainaro, tetapi ditempatkan dalam kondisi mengenaskan hingga Gubernur masa itu, Mario Carrascalão, turun tangan.

Akhir dasawarsa 1980-an Abilio kembali bergabung dengan kegiatan klandestin, sementara ia bekerja sebagai pegawai pemerintah Indonesia. Ia memberi kesaksian tentang pembentukan milisi Mahidi pada tahun 1999, dan bagaimana masyarakat setempat berupaya mencari cara untuk memenuhi permintaan menyiapkan laki-laki untuk menjadi milisi, namun pada saat yang sama tetap mendukung perlawanan Falintil. Ia menceritakan bagaimana setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada tanggal 4 September 1999, penduduk Mauchiga sekali lagi melarikan diri ke hutan di kaki Gunung Kablaki.

Pada tahun 1975, ketika kudeta dan kudeta balasan terjadi saya masih sekolah di Dili. Ketika Indonesia menyerbu, saya aktif dalam organisasi UNETIM (União Nacional dos Estudantes de Timor – Persatuan Nasional Pelajar Timor). Setelah invasi saya kembali ke kampung halaman di Mauchiga.

Pada tahun 1976, ABRI memasuki Builico, di Ainaro, dan kemudian Mauchiga. Penduduk Mauchiga melarikan diri ke kaki Gunung Kablaki. Ketika di sana, saya bekerja dalam perlawanan sebagai milisi Fretilin sampai 1977. Kemudian saya pindah ke peleton dari Pasukan Intervensi dan Penghancuran.

Pada tanggal 7 November 1977, militer Indonesia mulai memasuki Gunung Kablaki. Perlawanan bersenjata melemah, dan kemudian Kablaki dihancurkan. Situasi menjadi sangat buruk, sehingga perlawanan bersenjata harus bergerak ke daerah sekitar Alas, Manufahi. Pada akhirnya kami tertangkap. Militer Indonesia menempatkan saya di Hansip tetapi pada kenyataannya saya hanya menjadi seorang TBO (Tenaga Bantuan Operasi). Pekerjaan saya termasuk mengikuti tentara, mengambil beras dari Ainaro, dan menyediakan air untuk masak, minum, mandi, dan lain-lain untuk para tentara di Gunung Kablaki.

Karena saya selalu ingin mendapatkan pendidikan, pada tahun 1978 atau 1979, saya minta izin Komandan Koramil untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai Hansip di Mauchiga. Ia setuju. Saya kembali menjadi penduduk biasa lagi.

Tahun 1980, kami menghubungi saudara-saudara kami yang masih bersembunyi di Gunung Kablaki, seperti Komandan Caribuana, Julio Sarmiento, dan Mauhunu di kawasan sekitar Ailer mali, Mauchiga. Pada 3-5 Maret 1981, Xanana mengadakan sebuah



Abilio dos Santos Belo

Ketika Koramil mendengar bahwa ada dua orang wartawan Portugis yang berniat mengunjungi Ataúro, mereka memindahkan kami...

Kami tinggal di kota kecil Ataúro. Banyak anak dan orang tua yang sakit dan banyak yang meninggal karena waktu itu sangat panas.

konferensi besar di suatu tempat di wilayah Timur. Saya tidak tahu dimana tepatnya. Banyak dari kami yang ambil bagian dalam konferensi tersebut dan setelah konferensi itu berakhir kami kembali ke Mauchiga.

Segera sesudah konferensi tersebut, Xanana memerintahkan orang-orang untuk mencari kami ke Mauchiga. Ada beberapa tugas dari Xanana untuk kami. Xanana memerintahkan kami untuk memulai kegiatan klandestin di Mauchiga. Kontak kami dengan Xanana adalah Komandan Venancio Braz dan Mauhunu, mereka adalah bagian dari Pimpinan Nasional Hacsoloc.

Pada tanggal 6 Juli 1982 kami mengadakan pertemuan di Ailer mali, Mauchiga untuk membahas cara-cara meningkatkan kegiatan klandestin. Entah bagaimana rincian pertemuan tersebut bocor ke pihak musuh dan segera setelahnya kami ditangkap.

Pada tanggal 10 Juli 1982 Koramil dan Hansip Hatu Builico menangkap 16 orang (14 laki-laki dan dua perempuan) dan membawa kami ke Kodim di Ainaro. Setelah membawa kami ke sana, mereka memasukkan kami ke penjara untuk para tahanan khusus. Koramil juga mengadakan interogasi dan menyiksa kami satu per satu. Saya satu-satunya orang yang tidak dipukuli oleh Koramil dan Kasi I. Teman-teman saya dipukuli hingga mereka berlumuran darah. Beberapa meninggal di penjara. Beberapa selamat karena seorang dokter militer Indonesia memberi suntikan dan obat-obatan. Para serdadu juga melecehkan dan memeriksa anggota keluarga yang mengunjungi kami di penjara dan membawakan kami makanan. Mereka juga memakan makanan yang dibawa oleh keluarga kami.

Pada tanggal 20 Agustus 1982, Komandan Falintil Venancio Braz dan Mauhunu bersama dengan para pengikutnya melancarkan serangan di Hatu Builico dan Mauchiga, di Ainaro. Kami tidak dapat melakukan apa-apa karena kami di penjara. Kami pikir kami akan mati. Setelah serangan itu, para prajurit mulai menangkap penduduk Mauchiga. Beberapa dipenjarakan di Kodim Ainaro. Beberapa dibawa dan dibunuh di Builico, Ainaro yang merupakan bagian dari wilayah Ainaro Mau-Ulo III. Mereka menyiksa orang dengan kejam, juga membunuh. Mereka juga membunuh semua binatang peliharaan.

Pada tanggal 29 Agustus 1982, tentara Indonesia membawa kami ke Dili dalam dua mobil. Di dalam mobil tersebut mereka mengikat tangan dan kaki kami. Ketika tiba di Dili, kami dibawa ke Penjara Balide. Pada pukul tiga dini hari tanggal 31 Agustus 1982, para prajurit membawa kami ke pelabuhan Dili.

Di pelabuhan seseorang berkata, "Pemerintah tidak akan menghukum kalian. Karena kalian adalah warga Mauchiga dan Dare dan situasi di daerah kalian tidak aman, pemerintah mengirim kalian ke Ataúro."

Militer segera memerintahkan kami untuk masuk ke sebuah kapal penyeberangan. Di kapal itu saya bertemu kakak laki-laki dan perempuan saya, juga ibu dan nenek saya. Kami tiba di Ataúro tanggal 1 September 1982 pagi hari. Teman-teman yang telah tiba lebih dulu menyambut kami. Beberapa orang menanyakan informasi kepada kami, jadi kami memberitahu mereka tentang keadaan di Mauchiga.

Ketika Koramil mendengar bahwa ada dua orang wartawan Portugis yang berniat mengunjungi Ataúro, mereka memindahkan kami. Tapi mereka tidak memindahkan kami ke dalam penjara karena semua penjara telah penuh. Kami tinggal di kota kecil

Atauro. Banyak anak dan orang tua yang sakit dan banyak yang meninggal karena waktu itu sangat panas. Salah satu saudara saya, Julio Morais, terluka parah. Ia disiksa di Dare, Ainaro dengan kedua kakinya digantung dengan kepala di bawah seperti seekor babi. Dua orang wartawan, satu laki-laki dan satu perempuan, datang dan melihat kondisi para tahanan dan kemudian pergi lagi.

Kami hidup seperti itu selama tiga bulan. Selama penahanan ini kami sangat menderita karena kekurangan bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian. Makanan yang kami miliki hanya satu kaleng jagung berjamur untuk setiap keluarga setiap hari, yang diberikan oleh tentara Indonesia. Setelah tiga bulan, Palang Merah Internasional tiba di Atauro. Kehidupan kami menjadi jauh lebih baik. Rasanya seperti di surga. Semuanya berubah. Kami mempunyai segala macam makanan seperti beras, ikan, susu kaleng, obat-obatan, kacang hijau, dan lain-lain.

Pada bulan Oktober 1984, mereka yang ditahan di Atauro dikembalikan ke Dili. Kami semua yang berasal dari Ainaro pergi bersama dengan sebuah kapal. Ketika kami tiba di pelabuhan di Dili, tentara Indonesia telah menunggu kami dengan sebelas kendaraan. Sepuluh kendaraan digunakan untuk mengangkut orang dan satu kendaraan lagi untuk nasi bungkus yang kami makan dalam perjalanan ke Ainaro.

Ketika kami tiba di Ainaro, kami dibawa ke Bonuk, yang terletak antara Zumalai dan desa Cassa. Di Bonuk kami pikir kami semua akan mati. Tidak lama setelah kami tiba, anak-anak mulai banyak yang meninggal, juga para orang tua. Setiap hari dua atau tiga orang meninggal, termasuk salah satu kakak laki-laki saya, Mateus de Araújo. Kami berada di sana selama dua minggu.

Kondisi kami sangat buruk sehingga kami dikunjungi oleh Gubernur Timor Timur saat itu, Mário Viegas Carrascalão, dan para pejabat dari Ainaro, termasuk Bupati, Kodim, Polisi, dan Nanggala.

Gubernur Mário Carrascalão marah. Ia mengatakan, "Saya meminta anda semua untuk mengembalikan mereka semua ke desa masing-masing secepatnya. Kalau tidak, Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memaksa saya untuk melakukannya karena orang-orang ini juga adalah bagian dari komunitas internasional."

Militer mengatakan kepada Gubernur, "Lebih baik kalau mereka dipindahkan ke Cassa."

Gubernur Mário sangat marah. Ia mengatakan, "Saya tidak mau begitu dan itu tidak perlu. Saya ingin mereka dipindahkan ke tempat asal masing-masing."

Tak lama setelah kunjungan tersebut sebuah kendaraan militer membawa kami ke Ainaro, dan kemudian beberapa dari kami dibawa ke Mauchiga. Para tahanan dari Atauro harus tinggal di kota Ainaro. Setelah itu mereka membawa kami untuk tinggal di Builico Mau-Ulo III yang dikenal sebagai Jakarta II karena itu adalah tempat pembuangan mayat.

Tidak lama setelah tinggal di Builico, Palang Merah Internasional datang mengunjungi kami. Satu bulan setelah kepergian Palang Merah Internasional, tentara memerintahkan kami untuk kembali ke Dare. Ketika kami tiba di Dare kami masih hidup sebagai tahanan. Kami tidak memiliki kebebasan untuk bergerak dan selalu dicurigai. Pada saat itu teman-teman kami dari hutan ingin mempergunakan saya dalam kerja klandestin

Makanan yang kami miliki hanya satu kaleng jagung berjamur untuk setiap keluarga setiap hari, yang diberikan oleh tentara Indonesia.

Abilio dos Santos Belo

Di Bonuk kami pikir kami semua akan mati. Tidak lama setelah kami tiba, anak-anak mulai banyak yang meninggal, juga para orang tua. Setiap hari dua atau tiga orang meninggal.

untuk membantu perlawanan. Saya takut kepada militer dan merasa tidak aman sehingga pada tahun 1987 saya pindah dari Dare ke Mauchiga. Di Mauchiga teman-teman menemukan saya lagi. Saya tidak ingin mati, jadi saya memutuskan pindah ke Dili. Di Dili saya bekerja untuk suatu proyek. Setelah lama bekerja di Dili, saya merindukan ayah dan ibu, jadi kemudian saya kembali ke Mauchiga.

Pada tahun 1988, saya menerima sepucuk surat dari teman-teman di hutan, yang meminta saya untuk terus bekerja dalam gerakan klandestin. Jadi saya kembali aktif di gerakan klandestin. Pada 1991, Konis Santana datang ke Mauchiga, dan membangun kembali jaringan klandestin. Pada waktu itu saya diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi Sekretaris Desa Mauchiga. Pada waktu yang bersamaan saya menjadi sekretaris gerakan klandestin dan menyalurkan dana kepada teman-teman kami di hutan.

Tahun 1999, milisi Mahidi mulai terbentuk di Hatu Builico dan tak seorang pun yang menghentikannya. Karena itu saya bersama dengan para kepala desa Mulo dan Nunumoge mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk menerima milisi dengan tujuan untuk melindungi penduduk dari bahaya. Jadi kami juga membentuk milisi Mahidi di Hatu Builico. Karena adanya paksaan dari Koramil Ainaro, milisi di Mauchiga kami beri nama Mahidi Mauchiga. Kodim, Koramil, dan para pemimpin Mahidi dari Ainaro melantik milisi ini.

Setelah pelantikan, mereka mengajak para pemuda untuk bergabung dengan Mahidi Ainaro. Kami mengirimkan 200 pemuda dari Mauchiga untuk bergabung dengan mereka. Kami mengatakan kepada para pemuda Mauchiga yang dikirim untuk bergabung: "Kalian boleh pergi ... tapi kalian harus mengerti siapa diri kalian. Jangan berbuat hal-hal yang dapat melukai teman-teman kita di hutan."

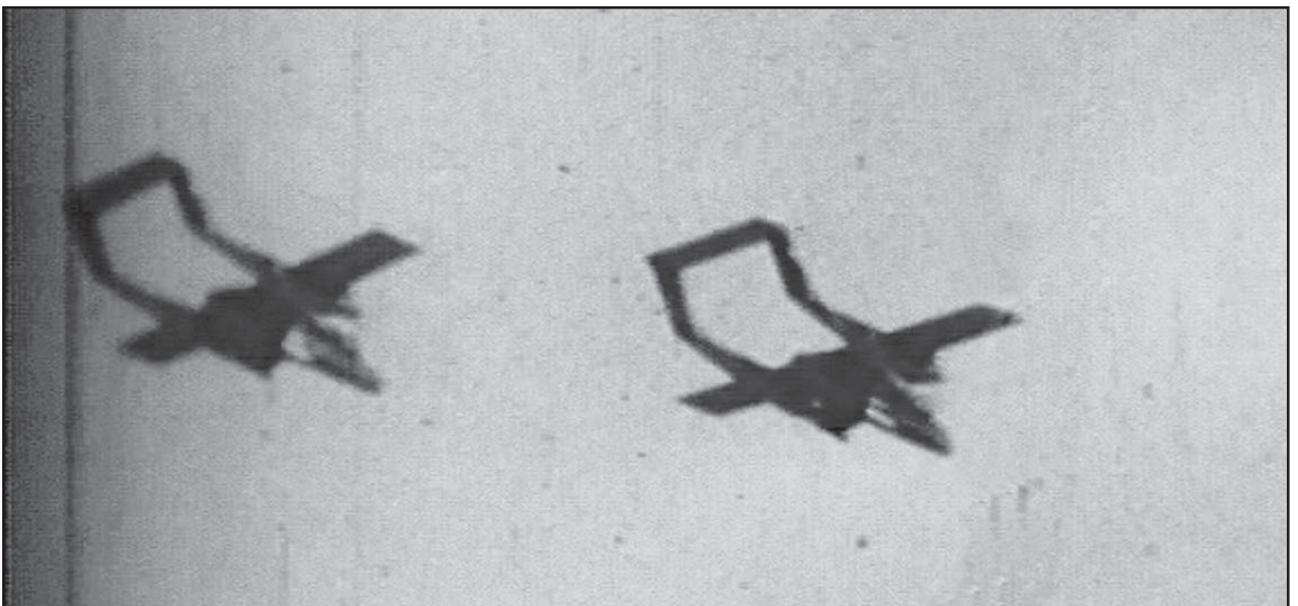
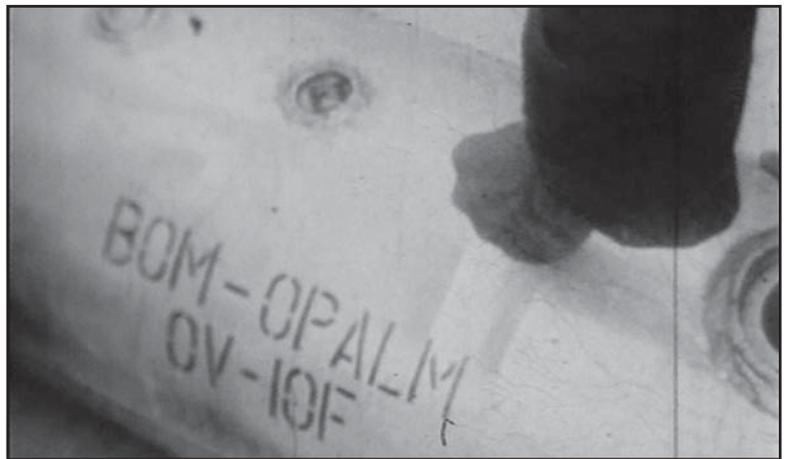
Pada 4 September 1999, ketika kami mendengar pengumuman bahwa pihak pro-kemerdekaan telah menang, seluruh rakyat Mauchiga melarikan diri ke hutan di kaki Gunung Kablaki, sampai Interfet tiba di Timor-Leste.



Saksi Ahli Pat Walsh dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Jose Ramos-Horta pada Audiensi Publik



CAVR mendengar kesaksian tentang bagaimana pesawat OV-10 Bronco, yang dihibahkan oleh Amerika Serikat, digunakan untuk menjatuhkan bom napalm pada tahun 1970an. Pesawat OV-10 Bronco ini dikenal sebagai "sakunar" (artinya: kalajengking) menjatuhkan bom OPALM -napalm buatan Rusia. Foto-foto diambil dari video promosi yang dibuat AURI tentang operasi udara di Timor-Leste pada tahun 1970an. Video ada dalam koleksi Arsip CAVR.



João Sereno

Distrik Covalima, 1975-1980an

Pada tahun 1974 João Sereno adalah bagian dari kelompok pendiri dari cabang Fretilin lokal. Ia memberikan kesaksian tentang kejadian sebelum aksi UDT Agustus 1975, ketika ia ditawan selama sepuluh hari, dan kemudian aksi balasan Fretilin.

João mengisahkan tentang serangan udara di atas Suai oleh pasukan terjun payung Indonesia pada tahun 1977, ketika penduduk sipil melarikan diri ke gunung-gunung. Ia menceritakan tentang tahun-tahun ketika rakyat terus-menerus terpaksa bergerak melarikan diri dari militer. Ini menyebabkan rakyat tidak dapat memetik hasil panen dan akhirnya terjadi kelaparan massal. Ia juga bercerita tentang serangan pesawat tempur yang meneror penduduk sipil. Orang-orang melarikan diri dan meninggalkan mereka yang disayangi untuk menyelamatkan diri masing-masing.



Pada bulan September 1974 kami enam orang dari Suai mengadakan pertemuan di Buamata. Tujuan kami adalah untuk membentuk sebuah cabang Fretilin. Kami mendukung Fretilin karena berjuang untuk kemerdekaan. Saya ditunjuk sebagai delegasi Fretilin yang bertanggung jawab untuk mengorganisir orang-orang di Suai Camanasa. Mayoritas penduduk daerah tersebut adalah pendukung Fretilin.

Tanggal 11 Agustus 1975 UDT melancarkan kudetanya di Suai. Mereka menangkap kami dan memasukkan kami ke penjara selama sepuluh hari. Pada 22 Agustus 1975 Fretilin melancarkan kudeta balasan sehingga saya dan teman saya dibebaskan.

Dua tahun kemudian, tahun 1977, pasukan terjun payung Indonesia mendarat di Suai. Kami melarikan diri ke hutan sekitar Jova, Suai dengan koordinator, asisten, dan pengurus Fretilin, dan orang-orang yang mendukung kemerdekaan dari Camanasa, Beco, Labarai, Lela dan Asumaten.

Kami tinggal di daerah sekitar Jova selama hampir tiga tahun. Pada tahun 1977 keadaan menjadi lebih sulit dan gerak kami menjadi semakin terbatas. Kami bergerak ke daerah Beco, di Halik, dimana banyak orang yang mati. Beberapa orang terbunuh oleh ranjau dan yang lainnya mati karena kelaparan. Kadang kami tidak dapat menguburkan mayatnya. Beberapa orang meninggal dalam posisi duduk yang pada mulanya kami pikir mereka hanya sakit. Kami baru menyadari bahwa orang itu telah mati ketika kami mau mengangkat atau membawa mereka.

Ketika mendengar pesawat tempur datang, kami ketakutan. Kami berlari menginjak orang-orang yang telah tertembak. Para orang tua menelantarkan anak-anak dan keluarga-keluarga menelantarkan orang-orang lanjut usia yang tidak bisa berlari. Kami harus melakukan ini untuk menyelamatkan diri.

Ketika tentara Indonesia mencapai Beco, kami melarikan diri ke Labarai. Setelahnya kami kembali ke Jova. Ratusan orang mati di Jova. Mereka bukan mati karena ditembak oleh militer atau terkena bom. Mereka mati karena kelaparan. Dalam satu hari dua hingga empat orang mati, sebagian besar anak-anak dan orang tua.

Kami menanam kebun kami, namun ketika musim panen datang musuh memasuki daerah kami dan kami harus melarikan diri, meninggalkan kebun-kebun kami. Agar bisa bertahan hidup kami harus mencuri makanan dari kebun orang lain. Kami mencuri makanan seperti ubi kayu, ubi jalar dan umbi-umbian lainnya. Ketika situasi menjadi begitu sulit kami mencari talas. Kami juga mencari maek yaitu semacam talas yang biasanya menjadi makanan babi. Getahnya dapat menyebabkan gatal-gatal dan penyakit kulit. Kami juga mencari kotomoruk yaitu semacam kacang kedelai yang rasanya pahit. Kami harus makan makanan tersebut untuk bertahan.



*Ratusan orang mati ...
Mereka bukan mati
karena ditembak oleh
tentara atau terkena
bom. Mereka mati
karena terkepung dan
tidak dapat memperoleh
makanan.*

*Mereka mati
karena kelaparan...
sebagian besar
anak-anak dan
orang tua.*

*Kelaparan, lokasi tidak diketahui,
Timor-Leste (sekitar 1979).*

Maria José da Costa

Distrik Manufahi dan Manatuto, 1977-1983

Maria José da Costa dari Same, Manufahi adalah seorang pelajar berusia 13 tahun di Dili pada waktu terjadi invasi militer Indonesia. Ia sedang berlibur di Soibada, Manatuto ketika tentara Indonesia menyerang Dili. Karena itu ia tetap tinggal di Soibada. Ketika pada 1977 ketika TNI mencapai daerah ini, ia melarikan diri ke hutan bersama komunitasnya.

Maria memberi kesaksian mengenai berbagai upaya orang Timor di pegunungan untuk mengorganisir dan saling melindungi. Ia mengajar anak-anak, dan aktif sebagai anggota komisi yang dibentuk untuk membantu orang yang paling rentan dan mencegah penyakit. Maria menceritakan mengenai serangan pengepungan oleh militer Indonesia terhadap penduduk sipil di gunung-gunung. Ia berkisah tentang serangan yang gencar terhadap penduduk sipil dari udara, laut, dan darat yang membuat penduduk harus terus bergerak, meninggalkan orang-orang yang telah tua, sakit, dan terluka.

Ia mengungkapkan penangkapannya pada tahun 1978 dan ditahan di bawah pengawasan ketat oleh tentara di kamp-kamp di daerah Betano selama lima tahun. Selama waktu itu terjadi kelaparan dan berjangkit penyakit akibat kontrol militer dan larangan untuk bercocok tanam.



Pada tahun 1975 saya adalah seorang pelajar di Dili. Pada saat terjadinya invasi Indonesia saya sedang liburan sekolah di Soibada, Manatuto. Namun setelah liburan saya tidak dapat kembali ke Dili karena militer Indonesia berada di sana.

Pada tahun 1976, kami masih di Soibada karena militer Indonesia belum memasuki Soibada. Mereka mencapai Soibada tahun 1977. Ketika mereka tiba semua orang melarikan diri ke hutan di daerah Leitula, Soibada. Pada waktu itu saya berusia 13 tahun. Meskipun saya masih muda, saya mengajar baca tulis kepada anak-anak di daerah Leitula. Segera setelah kami pindah ke Leitula, militer Indonesia menyerang sehingga kami pindah ke Fatuberlieu, Alas. Di Fatuberlieu, saya meneruskan mengajar anak-anak lain. Kami juga berkebun bersama. Kami berusaha untuk membantu para orang tua dan anak-anak, yang menderita dan sekarat.

Pada tahun 1977, kami pindah ke Lakudalu, di Fatuberlieu. Di Lakudalu saya giat dalam suatu komisi bernama Comissão de Apoio e Solidaridade (CAS) yang artinya Komisi Dukungan dan Solidaritas. Komisi ini berusaha membantu para pengungsi yang datang dari wilayah Tengah Utara. Komisi membantu orang-orang yang kelaparan dan sakit. Komisi juga membantu menguburkan orang-orang yang mati dan bekerja untuk mencegah penyakit. Komisi ini anggotanya hanya sepuluh orang. Kami diajar oleh Assistente Soimali yang sekarang sudah meninggal. Kami menjalankan pekerjaan komisi secara bergiliran. Lima orang bekerja selama satu minggu, dan lima lagi pada minggu berikutnya.

Assistente Soimali digantikan oleh Assistente Seran dari Bobonaro. Komisi terus memberikan bantuan kepada para pengungsi di Sarin, Alas, dan Fukiran, Fatuberlieu. Kami tinggal di Fukiran dan Sarin selama satu bulan. Setelah itu kerja komisi berakhir karena musuh menyerang dan orang-orang tercerai-berai menyelamatkan diri masing-masing.

Pada tahun 1978 musuh mengepung kami di Dolok dan banyak orang meninggal karena kelaparan. Semua persediaan makanan milik rakyat dibakar. Mereka mengepung kami dengan menyerang dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat terbang, dan dari darat dengan membakar alang-alang dan mengirim pasukan angkatan darat.

Pada waktu itu bulan Agustus yang merupakan musim kemarau. Tentara membuat api yang besar yang menjalar dengan cepat dengan menyemprotkan bensin ke alang-alang. Banyak orang mati karena tidak dapat menghindari api yang mengepung kami. Satu-satunya kesempatan kami untuk dapat melarikan diri adalah pada tengah malam ketika prajurit-prajurit Indonesia sedang beristirahat di perkemahannya. Ketika kami berusaha melarikan diri peluru memberondong kami dari kapal-kapal di laut. Saya menyaksikan banyak orang yang mati terbakar, termasuk nenek saya. Ketika ia terbakar ia berteriak, meminta air untuk diminum karena ia merasa sangat panas. Api membakar ke seujur tubuh hingga ke rambutnya. Yang bisa saya lakukan hanya mengikatkan tiga buah tempat air melingkari lehernya. Kemudian kami harus melanjutkan pelarian agar kami masing-masing dapat keluar dari daerah itu. Kami tidak dapat saling membantu. Kami korban dari keadaan.

Setelah keluar dari daerah itu kami melihat orang-orang tua yang ditinggalkan oleh keluarganya. Yang laki-laki mengenakan pakaian terbaik mereka, dan menggantungkan belak pada leher, memasang caibauk pada kepala, dan mengenakan gelang emas pada tangan mereka. Perempuan-perempuan mengenakan anting-anting dan kalung emas, dan mengenakan kerudung hitam menutupi kepala mereka, seolah-olah mereka akan pergi gereja. Kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk membantu karena musuh terus mengejar kami. Setelah kami keluar dari pengepungan, mereka terus mengejar kami. Dengan dukungan tembakan dari laut, mereka menggiring kami ke dataran tinggi. Kami terpaksa lari dan kami berhamburan ke segala penjuru. Kemudian musuh menangkap kami.

Mereka mengepung kami dengan menyerang dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat terbang, dan dari darat dengan membakar alang-alang dan mengirim pasukan angkatan darat... api yang besar yang menjalar dengan cepat ... banyak orang mati .karena tidak dapat menghindari dari api.

Maria José da Costa

Ketika kami berusaha melarikan diri peluru memberondong kami dari kapal-kapal di laut.

Saya menyaksikan banyak orang yang mati terbakar, termasuk nenek saya. Ketika ia terbakar ia berteriak, meminta air untuk diminum karena ia merasa sangat panas.

Kami tertangkap oleh tentara dari Linud (Angkatan Udara) 700 di Dolok dan dibawa ke Betano. Saya beruntung sekali karena dibawa ke Same. Jika saja saya menyerah atau ditangkap di Soibada mungkin saya akan mati karena banyak orang yang mengenali saya di sana.

Ketika di Betano kami tidak diizinkan untuk keluar lebih dari batas Sungai Karau-Ulun untuk berkebun. Bahkan di dalam batas wilayah, kami harus mendapatkan izin untuk keluar untuk jangka waktu tertentu. Ketika kami kembali, sekalipun tepat waktu, militer selalu mencurigai kami telah melakukan kontak dengan orang-orang di hutan. Para prajurit mengawasi kami dengan sangat ketat. Mereka menggunakan bermacam-macam cara intimidasi. Pada suatu sore mereka membawa sebuah daftar dan memanggil setiap orang yang tercantum di daftar termasuk lima sepupu laki-laki saya. Mereka dipanggil oleh tentara untuk diperintahkan membangun jalan utama, tapi mereka tidak pernah kembali. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi, jadi kami tidak tahu apakah mereka telah mati atau tidak.

Ketika kami pergi untuk menanam kebun kami, kami harus tetap berada di dalam batas kota. Karena peraturan ini, banyak orang yang mati kelaparan. Mereka yang mati tidak dikubur hanya dibungkus dengan tikar. Ada obat-obatan tapi tidak cukup. Dengan berjalannya waktu, lebih banyak lagi orang yang mati karena penyakit dan kelaparan. Kemudian tentara mulai memberi kami jagung yang sudah berjamur, tapi itu tidak cukup untuk memberi makan satu keluarga. Kami tinggal di Betano selama lima tahun. Kemudian kami pindah ke Same tinggal dengan suami saya yang telah bekerja di sana.



Maria José da Costa dan Manuel Carceres.



Laga, Distrik Baucau (1979). Masyarakat sipil yang menyerah dari pedalaman pada tahun 1970an, ditahan di kamp-kamp penahanan oleh Militer Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh pihak Indonesia tidak mencukupi, dan bantuan internasional yang diberikan oleh CRS (Catholic Relief Services) dan ICRC (Palang Merah Internasional) terlambat untuk menyelamatkan banyak orang.

Francisco Soares Pinto

Iliomar, Distrik Lautem, 1978-1979

Francisco Soares Pinto menceritakan bagaimana komunitasnya melarikan diri ke Gunung Matebian ketika militer Indonesia melancarkan invasi tahun 1975, dan bagaimana pada akhirnya mereka menyerah pada bulan November 1978. Awalnya ditahan di kota pegunungan bernama Baguia, Baucau mereka diperintahkan untuk kembali ke kota mereka Iliomar, Lautem. Francisco menceritakan keadaan di Iliomar yang benar-benar kosong dari penduduk ketika mereka datang, karena semua orang telah melarikan diri ke hutan.

Menurut Francisco, antara 1979-1984 komunitas Iliomar tinggal di kamp konsentrasi yang dikontrol tentara Indonesia. Gerak orang diatur secara total, sehingga tidak bisa bercocok tanam atau mencari makanan. Akibatnya kelaparan dan kematian merajalela. Ia menceritakan bahwa yang paling terkena adalah anak-anak dan orang tua.



Pada tanggal 29 November 1978 kami menyerah kepada militer Indonesia di Gunung Matebian. TNI membawa kami ke kecamatan Baguia di Baucau, dimana kami ditempatkan di kamp konsentrasi. Kemudian militer Indonesia memerintahkan kami untuk kembali ke desa kami masing-masing. Kami berjalan beriringan ke Iliomar, di Lospalos.

Kami tiba di Iliomar bulan Desember 1978 dan mendapati daerah tersebut telah kosong. Tidak ada seorang pun di sana, karena semua orang telah melarikan diri ke hutan. Jadi kami memutuskan untuk tinggal di Iliomar untuk sementara waktu. Kami semuanya sekitar 6000 orang.

Pada awal tinggal di Iliomar hidup kami relatif bebas. Kami diizinkan untuk keluar dan masuk kamp konsentrasi untuk mencari makanan.

Pada tanggal 28 Desember 1978, militer Indonesia dari Batalyon 328 tiba di Iliomar. Dua hari kemudian mereka membuat peraturan yaitu kami tidak diperbolehkan untuk pergi lebih jauh dari satu kilometer dari kamp konsentrasi. Karena larangan ini, kami tidak lagi bisa menemukan makanan. Akibatnya adalah kelaparan yang sangat parah.

Untuk bisa bertahan kami makan kelapa, tapi kemudian kami kehabisan. Setelah kelapa tidak tersedia lagi, tidak ada lagi yang bisa dimakan, jadi satu per satu orang mulai mati kelaparan. Orang-orang memotong pohon pisang dan memasak bagian dalam batang pisang untuk dimakan. Biasanya pelepah pisang digunakan untuk makanan babi. Kebanyakan orang yang makan pelepah pisang menderita sakit beri-beri dan kolera. Karena tidak ada obat-obatan, 5-10 orang dalam seminggu meninggal termasuk anak-anak, orang dewasa, dan orang tua.

Sepanjang pagi dan malam kami mendengar orang-orang menangis di seluruh penjuru kamp, karena banyak orang yang meninggal. Di setiap lubang kuburan dua sampai empat mayat yang dikuburkan. Saya memperkirakan sekitar 200 orang dari Iliomar meninggal karena kelaparan pada tahun 1978.

Pada bulan Desember 1979 bantuan dari Palang Merah Internasional (ICRC) mulai berdatangan. Bantuan ini berlanjut sampai 1981. Mereka membagikan beras, jagung, obat-obatan, susu, dan sabun. Karena bantuan ini kami merasa sedikit lebih baik tapi masih ada orang yang sekarat, khususnya anak-anak dan orang tua. Dalam satu hari sampai tiga orang yang meninggal karena kolera.

Pada tahun 1984 tentara Indonesia mengizinkan kami untuk keluar kamp konsentrasi untuk bercocok tanam di kebun di sawah. Untuk keluar dari kamp kami harus mempunyai sebuah surat izin dan harus dikawal ke kebun dan sawah oleh anggota militer Indonesia atau Hansip. Ketika kembali ke kamp, kami harus melapor ke pos militer di Iliomar. Dan kalau kami tidak melapor kembali, kami disiksa, dipukuli, ditendang, dan bahkan beberapa orang ada yang hilang.



Foto arsip, 1979..

Sepanjang pagi dan malam kami mendengar orang-orang menangis di seluruh penjuru kamp, karena banyak orang yang meninggal.

Di setiap lubang kuburan dua sampai empat mayat yang dikuburkan.

Joana Pereira

Quelicai, Distrik Baucau, 1978, 1981-82

Joana Pereira berasal dari Quelicai, Baucau. Pada tahun 1978 ketika berdiam di hutan, orang tuanya meninggal karena kelaparan. Joana waktu itu berusia 13 tahun. Bersama Mateus, adik laki-laknya yang berusia sembilan tahun, ia menyerah kepada militer Indonesia, tetapi kakak laki-laknya terus bersama perlawanan di hutan. Joana menceritakan bahwa keluarga-keluarga pejuang perlawanan dikumpulkan oleh militer dan aparat pemerintah Indonesia, dan dipindahkan ke Ataúro pada tahun 1981. Ia menceritakan bagaimana ia dan adik laki-laknya ditahan di sana selama lebih dari setahun. Tanpa tempat bernaung, makanan atau obat-obatan yang layak, ia menceritakan bahwa angka kematian per hari adalah dua sampai lima orang sampai Palang Merah Internasional membawa bantuan pada tahun 1982.

Pada bulan November 1982, Joana dan adik laki-laknya dibebaskan dari Ataúro setelah salah seorang kakak laki-laknya mengetahui keberadaan mereka dan melakukan intervensi kepada militer. Akhirnya ia dapat tinggal dengan kakak laki-laknya di Oecussi, dan kemudian ke Dili untuk menyelesaikan pendidikannya.



Pada tahun 1978, ketika kami tinggal di hutan, ayah dan ibu saya meninggal karena kelaparan. Setelah itu, saya dan adik laki-laki saya, Mateus, menyerah kepada militer Indonesia di desa Lakoliu, Quelicai, Baucau. Kami tinggal di sana dengan kakak perempuan dan kakak laki-laki kami. Kakak laki-laki saya yang lain Pascoal 'Nixon' Freitas masih di hutan bersama perlawanan bersenjata, melawan tentara Indonesia.

Pada tanggal 29 Agustus 1981, Komandan Quelicai berkata kepada kami, "Siapa pun yang masih mempunyai keluarga di hutan harus dihukum." Koramil membuat daftar nama kami semua. Mereka memberikan daftar tersebut kepada kepala desa, A (nama disamarkan), yang merupakan aparat dari Pemerintah Indonesia, dan sering digunakan untuk memata-matai dan mengawasi orang. Mereka yang ada di dalam daftar nama akan dipenjarakan.

Pada awalnya kami tidak tahu dimana kami akan dipenjara. Kemudian mereka memasang daftarnya di atas papan kayu lapis di depan kantor desa. Dari situ kami mengetahui bahwa karena Nixon masih di hutan kami akan dikirim ke Pulau Ataúro. Pada waktu itu saya berusia 13 tahun dan Mateus baru berusia sembilan tahun.

Keesokan harinya, Koramil Quelicai membawa kami ke pelabuhan Laga, Baucau. Kami dikawal oleh empat truk bersenjata. Kami singgah di Laga selama satu hari. Kemudian, pada sekitar pukul tujuh pagi keesokan harinya tentara Indonesia membawa kami ke Dili dengan kapal perang nomor 502. Banyak keluarga dari desa-desa lain seperti Seiçal, Buibau, Baucau, Quelicai, dan Laga sudah berada di kapal yang sama. Kami tiba di Dili sekitar pukul tujuh malam.

Ketika kami tiba di Dili, tentara memerintahkan kami untuk turun dari kapal. Mereka mengatakan kepada kami untuk mengambil semua barang kami termasuk pakaian dan makanan, seperti ubi jalar, beras, dan jagung, yang kami bawa sebagai bekal untuk pergi ke Ataúro. Kemudian tentara memerintahkan kami untuk makan makanan yang telah disediakan oleh militer Indonesia dalam ember-ember. Mateus mengambil makanan untuk kami berdua. Selama dua hari perjalanan ke Dili kami tidak punya apa-apa untuk dimakan.

Pada pukul delapan pagi tanggal 1 September 1981, kami pergi ke Ataúro dengan kapal perang nomor 511. Kami tiba di Ataúro pada pukul dua belas siang hari. Ketika kami turun dari kapal kami disambut oleh Koramil Ataúro dan orang-orang yang telah lebih dahulu dipenjarakan di sini. Para tahanan lain membantu kami menurunkan barang-barang yang kami bawa. Koramil Ataúro memerintahkan kami untuk membentuk sebuah barisan dan mendaftarkan nama kami satu per satu. Ketika setiap orang telah didaftar mereka membawa kami dengan mobil ke penjara. Di penjara saya tinggal terpisah dengan adik saya. Adik saya tinggal di rumah nomor 22 bersama dengan 60 orang, sementara saya tinggal di rumah nomor 24 bersama dengan 70 orang.

Rumah yang kami tinggali sama tidak ada perabotnya sama sekali. Atapnya seng, dinding-dindingnya terbuat dari terpal, dan tidak ada tempat tidur sama sekali. Kami mencari tali liar, semacam pohon lontar, yang tangkainya dapat dibuat menjadi tikar untuk alas tidur.

Pada awalnya kami tidak diberi makan sama sekali oleh tentara di sana. Mateus dan saya hanya makan makanan yang kami bawa dari Quelicai. Setelah di sana selama satu bulan kami menerima pembagian makanan yang terdiri dari tiga kaleng kecil jagung setiap dua minggu untuk satu kepala keluarga.

Karena pembagian makanan sangat sedikit maka terjadi kelaparan. Beberapa tahanan mengambil buah pepaya dan ubi jalar dari penduduk setempat. Ada orang yang mati karena digigit ular. Mereka yang mati kebanyakan adalah anak-anak dan orang tua, dan orang-orang yang berasal dari Lospalos dan Viqueque. Rata-rata dua sampai lima orang meninggal setiap hari.

Pada tahun 1982 Palang Merah Internasional membawa bantuan dengan helikopter. Mereka membagikan beras, kacang hijau, kedelai, ikan asin, teh, gula, garam, dan ikan kalengan, tapi tidak ada pakaian. Bantuan ini membuat kami bertahan hidup dan sejak itu kematian akibat kelaparan menurun.

Kakak laki-laki saya, Eduardo Freitas, mengunjungi kami pada bulan Oktober 1982. Ketika ia kembali ke Dili ia meminta Kodim dan polisi untuk membebaskan kami dari Ataúro. Mereka setuju. Segera setelah itu adik laki-laki saya dibawa ke Panti Asuhan

Karena pembagian makanan sangat sedikit maka terjadi kelaparan. ... Mereka yang mati kebanyakan adalah anak-anak dan orang tua ...

Joana Pereira

Pada tahun 1982 Palang Merah Internasional membawa bantuan dengan helikopter.. Bantuan ini membuat kami bertahan hidup dan sejak itu kematian akibat kelaparan menurun.

Anak Yatim-Piatu Motael di Dili bersama dengan anak-anak yatim-piatu yang lain. Kemudian, pada bulan November 1982, Koramil Atauro juga membawa saya kembali ke Dili, dengan perahu dayung.

Saya tiba di pelabuhan Dili pada pukul tujuh malam. Kakak saya Eduardo telah kembali ke Oecussi, jadi ia tidak menjemput saya. Para serdadu membawa saya untuk menginap di kantor Kodim di Dili. Saya takut karena saya seorang gadis dan sendirian. Tentara kemudian menelepon seorang anggota polisi bernama Jeremias. Ia adalah saudara saya. Ia membawa saya ke rumahnya.

Kemudian saya tinggal dengan seorang paman, Paulo di Fomento, Comoro. Selama saya tinggal di Dili, saya harus melapor ke kantor polisi di belakang tempat yang di zaman Indonesia menjadi kantor gubernur. Selanjutnya masih di bulan November kakak saya Eduardo datang ke Dili dan membawa saya ke Oecussi. Saya tinggal di Oecussi selama kira-kira tiga tahun, tetapi tidak sekolah. Pada tanggal 20 Desember 1985 saya kembali ke Dili. Pada tahun 1986 saya mulai sekolah dan tahun 1994 saya menamatkan pendidikan sekolah menengah saya. Sekarang saya tinggal di Fatuhada, Dili bersama keluarga saya sendiri.



Bantuan darurat internasional baru diperbolehkan masuk ke Timor-Leste pada akhir 1979.

Rosalina da Costa

Distrik Manufahi; Maubisse, Distrik Ainaro; dan Ataúro, 1980an

Rosalina da Costa menceritakan pengalamannya dan keluarganya di Same, dan ketika dipenjara di Ataúro pada awal dasawarsa 1980-an, sementara suaminya dan para lelaki lain masih berada di gunung berperang melawan tentara Indonesia. Ia mengungkapkan bagaimana ia menjadi sasaran militer dan bagaimana orang sipil Timor membantu militer dalam hal ini, karena suaminya masih di gunung. Ia juga menceritakan tentang perkosaan yang dilakukan oleh tentara Indonesia yang harus ia hadapi berbulan-bulan, sebelum akhirnya ia dan anak-anaknya dipenjara di Pulau Ataúro “selama empat tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari.”

Pada tahun 1981, A (nama disamarkan) liurai kami dan B (nama disamarkan) memaksa saya untuk mencari suami saya, Eduardo da Silva. Suami saya adalah salah satu delegado Fretilin di Rotutu, Kablaki. Mereka memberi saya sepucuk surat untuk diantar ke hutan agar orang-orang Fretilin bisa membacanya dan tergerak untuk keluar dari hutan dan menyerah. Pada waktu itu anak-anak saya masih sangat kecil, dan saya tidak tahu mengapa mereka terus memaksa saya untuk mencari suami saya di hutan sampai kaki saya luka-luka. Saya minta agar mereka bunuh saja saya, tapi mereka menolak.

A dan B kemudian memberikan informasi kepada militer Indonesia untuk menangkap saya dan saudari ipar saya dari Turiscaí. Kemudian kami ditahan di markas militer. Di sana saya diperkosa oleh C (nama disamarkan), seorang komandan militer. Saudari ipar saya diperkosa oleh salah seorang rekan kerja komandan militer itu, padahal waktu itu saudari ipar saya sedang hamil. Kemudian kami dikurung bersama dua perempuan lain dari Hatu-Udo, Ainaro. Salah satunya Builante (25 tahun), ditahan karena suaminya, Valente masih berada di hutan, begitu juga dengan suami ipar saya.

Saudari ipar saya dihukum oleh tentara karena suaminya, Lourenço Lobato masih berada di hutan. Karena dia sedang hamil tua, pamannya, Beremau kemudian datang untuk mengantarnya ke Maubisse. Tentara memperkosa kami selama tujuh bulan, tidak peduli bahwa saya sudah menikah dan saudari ipar saya sedang mengandung. Kemudian tentara Indonesia menahan saya di Kodim 1634 di Manufahi, Same selama tujuh bulan. Ketika kami ditahan di Same kami tidak lagi diperkosa.

Ketika berlangsung Operasi Kikis atau Operasi Pagar Betis di Aitana, komandan Kodim memerintahkan kami untuk tidak mencuci baju karena kami akan dipindahkan ke tempat lain. Keesokan harinya, anak-anak saya Henrique (6 tahun), Nelson (4 tahun) dan saya dipindahkan ke Ataúro. Ketika tiba kami langsung dibantu oleh pastor dan para biarawati. Setiap hari kami pergi mencari marunggi dan daun-daun lain di bukit untuk dimakan. Pemerintah memberi kami jagung sebanyak dua kaleng makanan untuk kebutuhan kami selama dua minggu. Anak-anak saya memakan jagung itu sambil menangi. Kami tidak membawa pakaian lebih dan kemeja anak saya hanyut terbawa ombak laut. Pada akhirnya mereka telanjang saja karena tidak ada pakaian lagi. Melihat anak-anak saya telanjang, seorang ibu memberikan pakaian anaknya kepada saya untuk dipakaikan ke mereka.



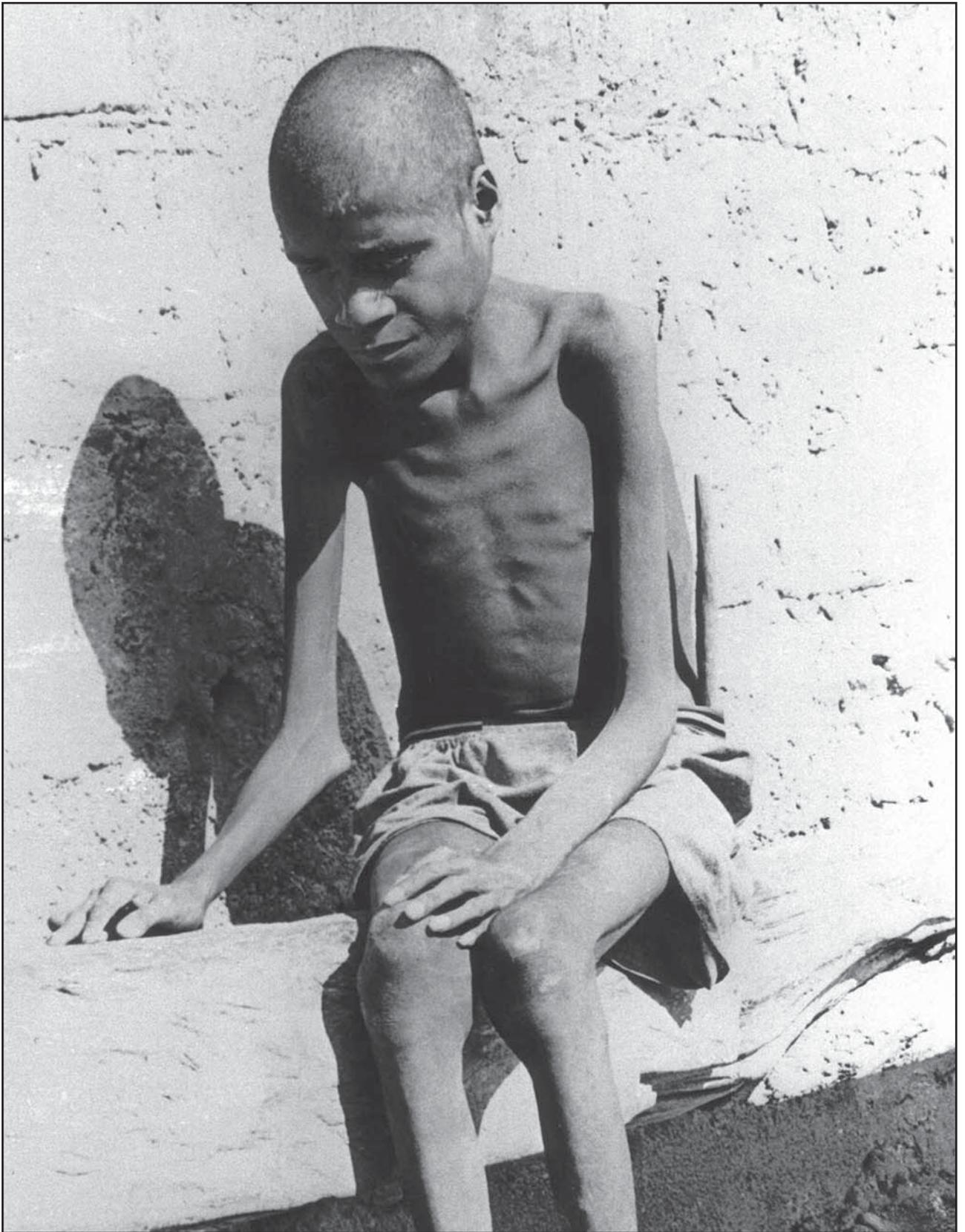
Tentara memperkosa kami selama tujuh bulan, tidak peduli bahwa saya sudah menikah dan saudari ipar saya sedang mengandung.

Kami dipenjara di Ataúro selama empat tahun, tujuh bulan, dan tujuh hari. Setelah itu kami dikembalikan ke Same. Setelah kami kembali dari Ataúro, kami tidak punya makanan dan tidak tahu di mana keberadaan keluarga kami yang lain. Kami sangat menderita.

Ketika kami masih tinggal di Ataúro, seorang komandan Hansip D (nama disamar-kan) memaksa anak perempuan saya Jacinta da Costa untuk menikah dengan anaknya. Jacinta kemudian meninggal di Aidahaleu, Same. Padahal D sama sekali bukan orang asing bagi kami. Kami masih saudara sepupu. D masih tinggal di Same. Dia sudah jadi gila.



Kuburan di Maubisse. Distrik Ainaro. Batu nisan ini menunjukkan bagaimana semua anggota sebuah keluarga besar meninggal antara 1976-1979.



Seorang pemuda di Laga, 1979, diperkirakan berumur sekitar 20 tahun.

(halaman kosong)

Kesaksian Ahli

Gilman dos Santos

Sejak pertengahan hingga akhir dasawarsa 1970-an, Gilman dos Santos bekerja sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah Indonesia di Timor-Leste. Ia terlibat dalam distribusi bantuan untuk pengungsi internal pada tahun-tahun awal konflik militer. Pada dasawarsa 1980-an ia bekerja dengan Catholic Relief Service (CRS). Kini Gilman adalah direktur Yayasan Ema Mata Dalam Ba Progresu (ETADEP).



Pandangan Umum

Gilman dos Santos memberi kesaksian tentang pekerjaan yang dilakukannya bersama Pemerintah Indonesia, selama dasawarsa 1970-an, memberikan bantuan bagi orang-orang Timor-Leste yang turun dari gunung dan ditahan di “kamp-kamp konsentrasi”. Ia memberikan kesaksian tentang bagaimana sejak tahun 1977 situasi mereka yang berada di pegunungan memburuk dengan adanya kegiatan militer Indonesia yang menghalangi mereka menanam tanaman pangan. Ia menceritakan bagaimana keadaan orang-orang yang menyerah sangat menyedihkan, serta keadaan kamp-kamp tempat mereka ditahan yang mengenaskan. Ia berkata bahwa pada tahun 1979 Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang yang mengharuskan semua pegawai negeri sipil menjadi warga negara Indonesia, sehingga membuat ia mengundurkan diri. Ia bercerita bagaimana pada tahun 1979 Catholic Relief Service, yaitu organisasi non pemerintah dari Amerika Serikat, akhirnya dapat memasuki Timor-Leste dan memberikan bantuan. Ia bekerja pada CRS sejak 1979 hingga awal dasawarsa 1980-an, dan tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam pekerjaan ini. Secara khusus ia menceritakan bagaimana Timor-Leste tertutup karena kebijakan pemerintah Indonesia, dan bagaimana hal ini benar-benar sangat membatasi kemampuan masyarakat internasional untuk membantu dalam krisis kemanusiaan yang dihadapi oleh orang-orang Timor-Leste.

Penyerahan diri besar-besaran dari pegunungan pada akhir dasawarsa 1970-an

Gilman Dos Santos memberikan kesaksian bahwa pada bulan-bulan dan tahun-tahun awal setelah invasi militer Indonesia, hingga sekitar tahun 1977, orang-orang yang telah lari ke pegunungan kebanyakan masih mampu menghidupi diri mereka dengan tanaman yang mereka tanam. Ia berkata bahwa militer Indonesia menguasai kota dan kota kecamatan, namun hingga tahun 1977 mereka tidak menguasai banyak wilayah lainnya.. Ia mengemukakan bahwa karena semakin banyaknya operasi di luar kota yang diadakan dan semakin luas wilayah yang dikuasai oleh tentara Indonesia, orang-orang yang berada di pegunungan semakin sulit untuk tinggal menetap dan menanam tanaman pangan. Menurutny ini adalah latar belakang penyerahan diri secara massal yang mulai terjadi pada akhir tahun 1977, dan ia mengamati bahwa keadaan mereka yang menyerahkan diri sangat buruk.

“Menurut perhitungan saya, situasi pangan di hutan antara tahun 1975 dan 1977 tidak begitu buruk. Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan. TNI hanya menguasai kota-kota kabupaten dan kecamatan, meskipun TNI melakukan serangan ke hutan-hutan.

“Dari tahun 1978 sampai 1979, tampaknya situasi pangan di hutan semakin memburuk, karena hampir semua daerah dikontrol oleh TNI: mulai dari kabupaten, kecamatan bahkan sampai desa-desa yang paling kecil dan terpencil. Dugaan saya terbukti benar, karena mereka yang menyerahkan diri kondisinya sangat kekurangan; mereka sangat, sangat kurus dan kelaparan.”

“Kamp konsentrasi” Indonesia

Gilman dos Santos mengatakan bahwa orang-orang yang menyerahkan diri atau ditangkap oleh tentara Indonesia ditahan di tempat yang disebut “kamp konsentrasi.”

“Orang-orang yang lari ke pegunungan turun pada tahun 1977, 1978, dan 1979. Setiap orang yang menyerahkan diri atau yang ditangkap oleh tentara Indonesia ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi, yang tidak layak bagi manusia. Mereka ditempatkan dalam tenda-tenda darurat yang besar, yang terbuat dari daun lontar atau rumput. Tentara menahan semua orang-orang itu, tanpa membatasi jumlah orang yang ditahan.

“Mengenai keadaan air, hal ini tergantung pada kondisi kabupaten tempat kamp konsentrasi tertentu. Misalnya sangat sulit memperoleh air di Liquiça atau bahkan di Metinaro.”

Gilman Dos Santos mengatakan bahwa ia bekerja pada pemerintah Indonesia setempat sejak akhir tahun 1977 hingga April 1979. Tugasnya menyalurkan bantuan untuk orang-orang Timor-Leste yang ditahan di kamp-kamp. Ia mengungkapkan bagaimana bantuan harus diberikan kepada pimpinan militer Indonesia yang akan mendistribusikannya kepada masyarakat.

“Kami mendistribusikan bantuan dalam bentuk makanan, seperti beras, mie, dan minyak goreng, ke kabupaten-kabupaten tempat para pengungsi yang menyerahkan diri dari gunung-gunung. Kami mendistribusikan bantuan dari Palang Merah Internasional dan Dinas Sosial Pemerintah Daerah ke Kodim dan ke Koramil, yang kemudian disalurkan kepada para pengungsi atau orang-orang yang mengalami kelaparan. Bantuan ini sangat terbatas jumlahnya, dan perhitungan yang dilakukan adalah bahwa satu keluarga mendapatkan bantuan sebanyak 5 kg dan kadang-kadang kurang dari itu.”

“Bantuan yang diberikan, hanya untuk bertahan pada beberapa hari pertama di tempat mereka disekap sebagai pengungsi. Setelah itu setiap orang harus berusaha sendiri untuk mempertahankan hidup atau dibantu oleh anggota keluarga yang datang untuk menjenguk atau menjemput mereka.”

Ia mengatakan bahwa tentara Indonesia seringkali menyimpan barang-barang bantuan dan menjualnya, bukannya menyalurkannya kepada masyarakat yang kelaparan.

Situasi pangan di hutan antara tahun 1975 dan 1977 tidak begitu buruk.

Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan.

bantuan dijual oleh Kodim atau Koramil ke toko-toko yang ada di sana atau kepada orang-orang setempat yang mampu membeli, dan seringkali bantuan tersebut hanya diberikan kepada keluarga-keluarga para anggota Kodim atau Koramil.

“Orang-orang mengatakan begitu dan kadang-kadang kami melihat sendiri bahwa bantuan dijual oleh Kodim atau Koramil ke toko-toko yang ada di sana atau kepada orang-orang setempat yang mampu membeli, dan seringkali bantuan tersebut hanya diberikan kepada keluarga-keluarga para anggota Kodim atau Koramil.”

Gilman dos Santos memperhatikan adanya kamp-kamp di Liquiça, Metinaro, Maubisse, Remexio, Laga, Quelicai, Alas, dan Zumalai. Ia memperhatikan kondisi orang-orang yang ditahan di kamp, serta kurangnya perhatian dan dukungan.

“Keadaan para pengungsi sangat mengkhawatirkan. Mereka tidak memiliki apa-apa selain pakaian di tubuh mereka yang sebagian besar terkoyak dan compang-camping. Ada yang hanya memakai karung goni untuk menutupi tubuh mereka. Mereka sangat kurus, hampir semuanya sakit; ada yang batuk, flu, malaria, sakit mata, sakit perut, beri-beri, diare, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan Palang Merah Indonesia untuk mengendalikan situasi dengan mengirim dokter-dokter sangat minim.”

Gilman mengatakan bahwa kondisi kamp-kamp di Liquiça dan Metinaro sangat buruk dan bahwa “setiap hari lima sampai sepuluh orang mati di kamp-kamp tersebut karena kelaparan atau sakit.”

Gilman dos Santos mengisahkan kesulitan yang dihadapi untuk membantu mereka yang menderita karena kurangnya bantuan dari luar. Ia mengingat kembali dampak kemanusiaan yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menutup Timor-Leste dari dunia luar.

“Pada waktu itu Timor-Leste tertutup bagi semua orang. Bahkan wartawan Indonesia tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Mengenai telekomunikasi, izin untuk melakukan hubungan telepon jarak jauh atau internasional tidak diberikan. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada informasi yang dapat keluar dari sini. Dipisahkannya Timor-Leste dari dunia luar oleh Pemerintah Indonesia, khususnya ABRI, jelas menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia adalah untuk mempersulit masuknya bantuan dari negara-negara lain.”

Ia teringat pada kunjungan para duta besar internasional ke Timor-Leste pada tahun 1978, dan menggaris-bawahi bahwa hampir satu tahun kemudian kunjungan tersebut baru membawa hasil dengan diizinkan bantuan internasional masuk ke Timor-Leste. Ia menyesalkan keterlambatan bantuan tersebut.

Catholic Relief Services

Gilman dos Santos menceritakan pengunduran dirinya dari Pemerintah Daerah pada tahun 1979, saat berlaku keputusan yang mengharuskan semua pegawai untuk menjadi warga negara Indonesia. Ia bergabung dengan tim CRS saat dibentuk pada bulan September 1979, dan kantor mereka bekerja 18 hingga 20 jam sehari, tujuh hari seminggu, pada masa darurat awal. Ia ingat bahwa CRS hanya memiliki tujuh truk, yang menurutnya sangat tidak mencukupi. Karenanya, CRS menyewa dua helikopter dan kendaraan lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan untuk bekerja di semua kabupaten.

“Ada beberapa tingkatan pembagian bantuan. Bantuan awal berupa makanan jagung CSB (Corn Soy Blend, campuran jagung dan kedelai), susu, pakaian, dan sabun. Kemudian beras, jagung, makanan jagung, dan CSM (Corn Soy Milk, susu yang terbuat dari campuran jagung dan kedelai), dan obat-obatan. CRS juga mempekerjakan staf medis dan menem-

patkan mereka di kabupaten-kabupaten untuk membantu orang-orang yang sakit. Setelah tahap pembagian makanan selesai dilakukan, untuk kembali mengolah tanah pertanian yang telah ditinggalkan selama lima tahun, CRS membawa 430 kerbau untuk disalurkan ke daerah-daerah yang subur. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berada di daerah bagian barat dan tengah, yakni tempat-tempat dimana banyak binatang terbunuh.”

Gilman Dos Santos menceritakan kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi staf CRS yang bekerja dalam masyarakat yang termiliterisasi.

“Saat menyalurkan bantuan seringkali staf CRS menemui hambatan dari tentara atau polisi. Mereka membuat segala macam alasan, karena pihak keamanan setempat tidak sepaham dengan pemerintah lokal (bupati dan camat), yang mendukung program bantuan CRS dan ICRC. Untuk mengatasi persoalan ini, kami mengatakan bahwa bantuan ini datang dari Amerika, dan menunjukkan gambar bendera Amerika yang tercetak pada bungkus makanan. Kami mengatakan bahwa bantuan makanan ini adalah bantuan kemanusiaan dari pemerintah dan rakyat Amerika untuk orang-orang yang kelaparan, dan tidak untuk dijual.

Ia mengungkapkan bahwa sementara ada tentara dan polisi menghambat kerja CRS, ada beberapa wilayah yang pihak keamanannya mendukung program bantuan darurat CRS tersebut.

“Pihak keamanan dan pemerintah setempat yang mendukung bantuan CRS adalah mereka yang berada di Lacló, Manatuto bersama dengan Inácio Fernandes (almarhum), yang saat itu bekerja sebagai camat; di Alas, Manufahi bersama dengan camat Octávio Morato; di Fatuberliu, Manufahi bersama dengan camat Tito Lopes; juga dengan Koramil di Vermasse, Baucau, Koramil di Alas dan Koramil di Turisca, Manufahi.”

Kata penutup: dilanjutkannya kebijakan pemindahan penduduk

Gilman dos Santos mengakhiri kesaksiannya dengan menekankan penderitaan yang terjadi di Timor-Leste akibat kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengisolasi Timor-Leste dari bantuan internasional. Ia menambahkan bahwa pada tahun 1979,

“ABRI dan pemerintah setempat menjalankan program konsentrasi dan menempatkan orang-orang di tempat-tempat strategis dekat jalan, supaya dapat lebih mudah mengawasi mereka yang turun dari pegunungan khususnya, tetapi juga seluruh masyarakat pada umumnya. Hal ini juga dilakukan untuk mengisolasi pejuang kemerdekaan yang masih berada di hutan-hutan.”

Saat menceritakan bagaimana kebijakan pemindahan ini diterapkan, khususnya bagi keluarga para pejuang kemerdekaan yang berada di pegunungan, ia mengatakan,

“Pada tahun 1980, ABRI dan pemerintah setempat kembali memindahkan secara paksa orang-orang yang dicurigai memiliki keluarga yang menjadi pejuang kemerdekaan yang berada di hutan-hutan, ke pulau Ataúro.”

Gilman dos Santos menutup kesaksiannya dengan menyatakan harapannya agar kesaksiannya dapat membantu CAVR mengungkap kebenaran dari masa kesengsaraan yang luar biasa yang bagi orang-orang Timor-Leste.

*Pada waktu itu
Timor-Leste tertutup
bagi semua orang...
[Ini] jelas menunjukkan
bahwa kebijakan
Indonesia adalah untuk
mempersulit masuknya
bantuan dari negara-
negara lain.*

Pat Walsh, Mantan Direktur Hak Asasi Manusia, Australian Council for Overseas Aid (ACFOA)

Pat Walsh telah terlibat dengan Timor-Leste dalam kapasitas yang berbeda-beda sejak tahun 1975. Tahun 1979 beliau membuat laporan mengenai kelaparan di Timor-Leste pada tahun 1978-1979 untuk organisasi-organisasi non-pemerintah di Australia berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumber-sumber gereja di Indonesia dan Timor-Leste, juga dari pengungsi dan sumber lain. Setelah menulis laporannya, ia mengkoordinasikan pengajuan permintaan dana untuk korban kelaparan, menghadiri dengar pendapat Kongres Amerika Serikat tentang krisis tersebut, kemudian melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini di Amerika Serikat dan Eropa termasuk Vatikan. Penelitiannya mengenai masalah ini banyak dikutip. Ia berhasil mempengaruhi Senat Australia untuk mempelajari kondisi sosial di Timor-Leste dan bersaksi mengenai masalah kelaparan pada dengar pendapat Senat pada tahun 1983. Pada masa itu ia mulai bekerja untuk Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) dan menjadi direktur pertama program hak asasi manusia regional tahun 1985-1999. Ia bekerja untuk seluruh kawasan Asia, terutama dalam mendukung pengembangan inisiatif-inisiatif dan organisasi-organisasi hak asasi masyarakat sipil lokal. Sekarang ia adalah anggota senior Unit Hak Asasi Manusia UNMISSET dan ditugaskan di CAVR sebagai sebagai Penasehat Khusus.

Pandangan Umum



Pat Walsh menyampaikan submisi kepada CAVR yang menganalisis konteks politik, militer, kemanusiaan, dan semua konsekuensi dari apa yang disebutnya sebagai “kelaparan dahsyat 1978-1980” di Timor-Leste. Ia menceritakan tentang persiapan dan tanggapan terhadap laporan tahun 1979, yang menurutnya menyimpulkan bahwa “Timor-Leste sedang berada dalam cengkeraman krisis kemanusiaan yang skalanya dapat menghancurkan.”

Pat Walsh mengatakan bahwa tujuan dari kesaksiannya ini ada dua, yaitu untuk melengkapi kesaksian para korban dengan membagikan apa yang diketahui dan dilakukan oleh organisasi-organisasi di luar Timor-Leste mengenai kelaparan; dan untuk mengemukakan beberapa masalah yang mungkin akan dibahas oleh CAVR dalam penyelidikannya yang lebih luas.

Ia memersembahkan kesaksiannya kepada semua orang yang meninggal akibat kelaparan di Timor-Leste dan secara khusus kepada ‘gadis tanpa nama dari Laga’, yang fotonya dengan badan kurus-kering dipublikasikan di seluruh dunia pada bulan Oktober 1979.

Konteks politik dan militer dari kelaparan

Pat Walsh mulai menempatkan kelaparan ini dalam konteks politik dan militernya.

“Pada waktu itu serbuan Indonesia untuk menguasai Timor-Leste sedang menghadapi masalah baik di Timor-Leste sendiri maupun secara internasional. Karena besarnya kekerasan dan kekejaman intervensi militer Indonesia, banyak sekali penduduk yang melarikan diri ke pegunungan ... walaupun unggul dalam jumlah pasukan dan senjata yang lebih lengkap, Indonesia tetap gagal menghancurkan Fretilin secara militer. Kegagalan untuk menaklukkan secara cepat dan memenangkan hati rakyat Timor-Leste yang disertai dengan kemunduran diplomatik yang lebih buruk bagi Indonesia, karena masalah ini menarik perhatian PBB, Kongres Amerika Serikat, dan berbagai forum internasional lainnya. Bagi Jakarta dan negara sahabat utama Indonesia, hal ini sangat memalukan karena selama ini mereka selalu menekankan pentingnya pengambil-alihan secara cepat dan dengan publikasi seminimal mungkin ...”

Dalam konteks ini, katanya, Indonesia melancarkan gelombang serangan militer baru. Bulan September 1977, serangan pertama berupa serangan darat ‘cari dan hancurkan’ dan

pengeboman dengan sasaran persediaan makanan Fretilin, yang dilakukan oleh tambahan tentara berkekuatan 15.000 orang dan didukung oleh pesawat perang yang disediakan oleh Amerika Serikat. Pada bulan Mei 1978, serangan militer yang diberi nama “Operasi Mercusuar” bertujuan untuk mengepung dan memaksa penduduk untuk menyerahkan diri, dengan tujuan memotong sumber makanan Fretilin. Menurutnya, sasaran operasi ini adalah penduduk dalam jumlah banyak yang belum menyerah pada gelombang serangan pertama, yang melarikan diri ke kawasan Gunung Matebian. Ia berkata:

“Dari sudut pandang militer, serangan ini sangat berhasil karena dapat mengenyahkan perlawanan secara nyata walaupun hanya sementara waktu. Tetapi dari sisi kemanusiaan, operasi ini adalah bencana.”

Melaporkan keadaan pada tahun 1979 – mendapatkan dan menganalisis informasi

Pat Walsh menceritakan, ”menyusun laporan tentang kelaparan dengan konteks yang sangat penting itu tidak mudah.” Ia berbicara mengenai sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya pada waktu militer Indonesia tidak memperkenankan orang asing untuk masuk ke Timor-Leste. Menyampaikan hasil penemuannya di Australia juga bisa menjadi masalah, menurutnya, karena masalah Timor-Leste sangat politis dan penuh pertentangan, dan bahwa “pendangan satu orang, apapun itu, pasti akan diserang oleh pihak lain.” Ia memuji komitmen badan-badan bantuan Australia pada Timor-Leste yang memberinya mandat untuk menuliskan laporan ini. Laporan ini disahkan oleh ACFOA bulan Juli 1979, mewakili lebih dari 100 badan bantuan Australia. Laporan ini menyimpulkan bahwa unsur utama dari krisis yang dihadapi oleh Timor-Leste adalah:

- *Jumlah korban meninggal terus meningkat karena perang yang berkepanjangan, kekurangan gizi, dan penyakit.*
- *Pemindahan besar-besaran penduduk dari pedalaman ke kamp-kamp yang penuh masalah yang dikontrol Indonesia.*

Pada bulan Mei 1978, serangan militer yang diberi nama “Operasi Mercusuar” bertujuan untuk mengepung dan memaksa penduduk untuk menyerahkan diri, dengan tujuan memotong sumber makanan Fretilin.

Pat Walsh

[Menurut laporan ACFOA]...sebanyak 300.000 penduduk telah turun dari gunung pada akhir tahun 1978, dan sebagian besar dari mereka berada dalam keadaan yang sangat buruk.

- *Kurangnya kapasitas Palang Merah Indonesia, yang menjadi satu-satunya penyalur bantuan internasional diijinkan bekerja, selain dari program yang kecil dari Gereja Katolik.*
- *Penyalahgunaan bantuan*

Mendasarkan temuannya dari laporan-laporan Gereja, sumber-sumber diplomatik dan badan bantuan lainnya, ia mengatakan bahwa perkiraan yang disebutkan dalam laporan adalah bahwa sebanyak 300.000 penduduk telah turun dari gunung pada akhir tahun 1978, dan sebagian besar dari mereka berada dalam keadaan yang sangat buruk. Laporan juga menyebutkan perlunya operasi pemberian bantuan besar-besaran dan segera untuk menghindari tragedi yang lebih buruk lagi. Ia mengatakan bahwa wakil dari World Vision Indonesia, seperti halnya Palang Merah Indonesia, telah melaporkan situasi ini, dan bahwa pada bulan September 1978 sebelas duta besar asing dan sejumlah wartawan, disertai oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Dr. Mochtar Kusumaatmadja datang mengunjungi Timor-Leste. Mereka datang mewakili pemerintah Kanada, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Bangladesh, Mesir, Suriah, dan Irak. Mereka diberi tahu bahwa 125.000 penduduk telah turun dari gunung dan 20.000-30.000 di antaranya dalam kondisi yang sangat parah. Ia juga menyebutkan bahwa empat duta besar (dari Australia, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat) langsung meminta segera dilakukan operasi bantuan internasional.

Masalah yang memprihatinkan

Pat Walsh berbicara tentang serangkaian masalah yang menurutnya ‘memprihatinkan’ yang diidentifikasi di dalam laporan. ACFOA, menurutnya, mengajukan beberapa pertanyaan penting mengenai korban, sebab, tanggapan, dan akibat dari bencana kemanusiaan yang terus berlanjut. Dalam banyak kasus, jawaban yang pasti tidak tersedia pada waktu itu, tetapi menurutnya ACFOA dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat sementara. Antara lain bahwa penduduk turun dari gunung karena didorong oleh keharusan mempertahankan hidup dan bahwa “perang jelas adalah pendorongnya.” Menurutnya ada yang menyimpulkan lebih lanjut, menyebutkan laporan oleh James Dunn tanggal 26 September 1979 yang mengungkapkan keyakinan bahwa krisis ini adalah hasil dari “strategi yang disengaja untuk membuat Fretilin dan pendukungnya kelaparan supaya menyerah.”

Pat Walsh mengatakan bahwa kemajuan militer Indonesia ini memaksa perlawanan untuk meninjau ulang strategi mereka dan akhirnya “melepaskan penduduk yang berada di bawah kendali mereka.” Ia mencatat bahwa penelitian pada waktu itu menunjukkan bahwa militer Indonesia telah melancarkan operasi yang sistematis untuk menempatkan penduduk di dalam pusat-pusat yang dikontrol Indonesia. Tempat-tempat ini punya beberapa sebutan seperti “pusat bantuan,” “kamp konsentrasi,” dan “pemukiman strategis,” dan sangat mirip dengan teknik anti-pemberontakan yang digunakan terhadap gerilyawan di tempat-tempat seperti Rhodesia, Malaysia, dan Vietnam. Menurut Pat Walsh, ACFOA melaporkan bahwa kehidupan di tempat-tempat seperti itu serba sulit dan terbatas. Menurutnya, statistik dari Departemen Pertahanan Indonesia yang diperoleh ACFOA pada waktu itu menyebutkan lebih dari 300.000 penduduk Timor-Leste tinggal di kamp-kamp semacam ini hingga bulan Desember 1978.

Embargo bantuan asing dan hukum humaniter internasional

Pat Walsh mengatakan bahwa pada tiga tahun pertama pendudukan di Timor-Leste, Indonesia melarang masuknya lembaga-lembaga bantuan asing dan perorangan, yang

menyebabkan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi satu-satunya saluran untuk memberikan bantuan. Ia mempertentangkannya dengan keadaan tahun 1999 dan mengatakan,

“Sekarang harus dipertanyakan apa motivasi Indonesia dalam pelarangan itu, apa konsekuensi kemanusiaan dari kebijakan tersebut dengan mengingat dampak kemanusiaan dari invasi dan serangan militer, dan apakah larangan ini melanggar hukum internasional?”

Ia juga mengatakan, “Lembaga-lembaga Australia percaya bahwa embargo bantuan asing adalah bagian dari embargo yang lebih besar terhadap media independen dan badan-badan hak asasi manusia yang dirancang untuk menutup Timor-Leste dari pandangan publik.”

Pat Walsh berbicara tentang kewajiban Indonesia, khususnya, berdasarkan hukum humaniter internasional pada konteks ini:

“Hukum humaniter internasional menyebutkan bahwa penduduk yang terkena bencana atau konflik bersenjata berhak atas perlindungan dan bantuan. Hukum ini menetapkan kewajiban hukum yang dikenakan pada negara dan pihak-pihak yang berperang untuk memberikan bantuan atau memungkinkan penyediaannya, juga mencegah dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar ... Tetapi jelas bagi kita semua bahwa upaya pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia di prioritasnya jauh lebih rendah di bawah operasi militernya dan bahwa lembaga-lembaga independen tidak akan diperbolehkan untuk masuk sebelum Indonesia mencapai tujuan militernya.”

Tanggapan pada laporan

Pat Walsh menyebut tanggapan pada laporan itu sebagai “mencerminkan keterpecahan pendapat di dalam Australia mengenai persoalan Timor-Leste.” Tanggapan awal 14 badan bantuan Australia adalah menghubungi International Disaster Emergencies Committee (IDEC – Komite Darurat Bencana Internasional) untuk melancarkan seruan pendanaan publik untuk Timor-Leste. Walaupun demikian, ia menceritakan bagaimana Palang Merah Australia, yang juga mencerminkan posisi pemerintah Australia, menggunakan hak vetonya sebagai anggota dari IDEC untuk mencegah pengajuan itu. Akhirnya ICRC mengajukan permohonan sendiri, menggunakan iklan yang sama sekali tidak menyebutkan apa yang menyebabkan bencana ini dan peran Indonesia di dalamnya.

Pat Walsh mengenang bahwa beberapa bulan kemudian pada tahun 1980, ketika ia berkunjung ke Amerika Serikat mewakili ACFOA, ia menghadiri dengar pendapat Kongres Amerika Serikat dengan pokok bahasan bantuan untuk Timor-Leste, yang disusul dengan pertemuan dengan CRS yang tidak hadir dalam dengar pendapat tersebut. Menurutnya, saat itu CRS membiayai iklan layanan masyarakat di televisi yang menayangkan Sri Paus yang mengemukakan bahwa bencana ini terjadi karena kemarau panjang. Pat Walsh juga menceritakan tentang kunjungannya setelah itu ke Vatikan di Roma, serta ke ICRC dan badan-badan Gereja di Jakarta. Ia mengatakan bahwa, “Tema inti dari upaya advokasi ini adalah untuk menerangkan situasi ini adalah bahwa operasi-operasi militer adalah penyebab pemindahan paksa penduduk dan kondisi menyedihkan mereka, (dan bahwa) masalah Timor-Leste tidak bisa hanya disebut sebagai masalah pemberian bantuan saja, tetapi intinya adalah masalah keadilan internasional.”

Mengenai tanggapan yang kompleks dari Gereja Katolik, Pat Walsh mengemukakan,

“Ada bermacam-macam pendapat dalam Gereja Katolik tentang Timor-Leste. Banyak orang di Timor-Leste yang mencari pertolongan ke Gereja dan Dom Martinho Lopes

“Sekarang harus dipertanyakan apa motivasi Indonesia dalam pelarangan itu, apa konsekuensi kemanusiaan dari kebijakan tersebut dengan mengingat dampak kemanusiaan dari invasi dan serangan militer, dan apakah larangan ini melanggar hukum internasional?”

[Situasi yang ditemui penuh] penderitaan manusia yang parah disebabkan oleh penyakit dan kelaparan. Tingkat kematian tinggi.

Banyak sekali remaja dan orang dewasa muda yang kurus-kering akibat kekurangan makanan, keadaan yang telah membuat mereka menjadi tak lebih daripada tengkorak berjalan ...

dan kemudian Dom Carlos dengan berani berbicara untuk rakyat Timor-Leste. Tetapi kunjungan saya ke New York dan ke Vatikan pada tahun 1980, dan kunjungan yang cukup sering ke perwakilan Vatikan di Jakarta, membuat jelas bahwa perhatian para pemimpin gereja lokal ... selalu dinomor-duakan dibawah pada apa yang disebut sebagai kepentingan nasional. Yaitu Gereja terlalu memperhatikan hubungannya dengan Islam pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.”

Advokasi Timor-Leste

Pat Walsh kemudian menceritakan usaha orang Timor-Leste untuk mengangkat masalah kelaparan dalam konteks politik yang lebih luas. Ia menceritakan tentang kerja Pastor Francisco Fernandes dan Pastor Apolinario Guterres ketika mereka berbicara di depan Komite Dekolonisasi PBB di New York mewakili masyarakat pengungsi Timor-Leste di Portugal. Paulo Pires tampil di depan Komite PBB atas nama UDT. Menurutnya, itu semua melengkapai pekerjaan yang dilakukan oleh José Ramos-Horta dan kawan-kawan. Hasilnya resolusi-resolusi Majelis Umum PBB waktu itu mulai menyebut kelaparan dan kebutuhan bantuan kemanusiaan penduduk Timor-Leste.

Dijinkannya CRS dan ICRC masuk ke Timor-Leste

Pat Walsh menceritakan bagaimana pada akhir tahun 1979 Indonesia melunakkan “kebijakan garis keras dan berdampak berat,” dengan membolehkan CRS dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mulai masuk dan bekerja di Timor-Leste, yang menurutnya, dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dengan penuh semangat dan efisiensi dalam konteks yang sangat sulit. Ia juga mengatakan bahwa 18 bulan berikutnya ICRC dengan Palang Merah Indonesia (PMI), membantu 80.000 penduduk yang dipaksa pindah di 15 desa dan menyelamatkan nyawa banyak orang. Menurutnya, ICRC melayani penduduk yang dipindahkan ke Ataúro hingga tahun 1986, dan laporan mereka menyebutkan bahwa pemindahan ini jelas adalah akibat dari kegiatan militer.

Pat Walsh mengatakan bahwa sepanjang periode ini, CRS menghabiskan 4 juta dolar Amerika Serikat untuk mendistribusikan 17.000 ton makanan dan juga obat-obatan, pakaian, sabun, bibit, perlengkapan pertanian, dan kerbau. Ia juga bercerita bahwa CRS kemudian meneruskan komitmennya pada Timor-Leste dalam jangka panjang.

Pat Walsh bercerita mengenai tugas berat yang dihadapi lembaga-lembaga ini tergambar dalam laporan kunjungan survei CRS ke Timor-Leste pada bulan Mei 1979, yang disusun oleh Direktur Programnya, Frank Carlin, seorang veteran yang telah selama 14 tahun bekerja di bidang bantuan di Asia. Pat Walsh mengutip dari laporan tersebut:

“Situasi yang diamati oleh Frank Carlin ... adalah, di banyak tempat, penderitaan manusia yang parah disebabkan oleh penyakit dan kelaparan. Tingkat kematian tinggi. Mereka yang sakit parah tidak hanya terbatas pada anak-anak dan orang tua – biasanya mereka adalah orang pertama yang mati akibat penyakit dan kelaparan. Banyak orang yang sudah mendekati ajalnya padahal mereka masih dalam usia prima. Banyak sekali remaja dan orang dewasa muda yang kurus-kering akibat kekurangan makanan, keadaan yang telah membuat mereka menjadi tak lebih daripada tengkorak berjalan ...

di tempat-tempat dimana banyak penduduk baru turun dari gunung, keadannya lebih gawat dibandingkan apapun yang pernah dijumpai Frank Carlin ...”

Menyadari bahwa upaya-upaya lembaga-lembaga itu telah menyelamatkan hidup banyak penduduk, Pat Walsh memberi komentar,

“Bencana kelaparan ini adalah keadaan darurat yang rumit yang tergolong tingkatan tertinggi. Bencana ini tidak hanya melibatkan nyawa manusia yang berharga tetapi juga kepentingan kekuasaan yang besar. Badan-badan ini menghadapi dilema bagaimana mereka bisa memenuhi tugas kemanusiaan mereka tanpa pada waktu yang sama justru membantu militer Indonesia mencapai tujuannya di Timor-Leste ...”

Pat Walsh mengatakan bahwa pada tahun 1994 badan-badan bantuan bencana menyadari perlunya ketentuan perilaku profesional untuk mengatur penyampaian bantuan dalam keadaan darurat yang rumit seperti Timor-Leste dasawarsa 1970-an. Ia mengatakan bahwa CRS dan ICRC membantu merumuskan ketentuan perilaku ini dalam 10 prinsip yang termasuk di dalamnya adalah janji bahwa bantuan tidak akan digunakan untuk menguntungkan pendirian politik tertentu, bahwa badan-badan bantuan akan menghormati kebudayaan dan kebiasaan serta tidak akan bertindak sebagai alat dari kebijakan pemerintah.

Rekomendasi

Pat Walsh menyimpulkan kesaksiannya dalam empat rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh CAVR, dengan memusatkan perhatian pada proses penyembuhan lebih lanjut bagi komunitas dan membantu penduduk Timor-Leste dan komunitas internasional untuk belajar dari masa itu:

1. *Bahwa CAVR mendukung rekomendasi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dari Ketentuan Perilaku Palang Merah kepada pemerintah negara-negara yang terkena bencana dan juga kepada organisasi-organisasi antar pemerintah.*
2. *CAVR meminta pemerintah-pemerintah dan badan-badan yang disebutkan di atas untuk membantu CAVR dalam penyelidikan lanjutan mengenai kelaparan ini, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan persoalan-persoalan yang terkait.*
3. *Pembangunan sebuah monumen atau tempat peringatan yang permanen dan mendidik untuk mengingat peristiwa ini.*
4. *Penduduk Timor-Leste didorong dan dibantu untuk merekam dan menulis pengalaman-pengalaman mereka termasuk tentang keterampilan-keterampilan bertahan hidup yang praktis yang mereka gunakan, untuk membantu proses pemulihan dan juga untuk menyediakan rekaman sejarah bagi masa depan.*

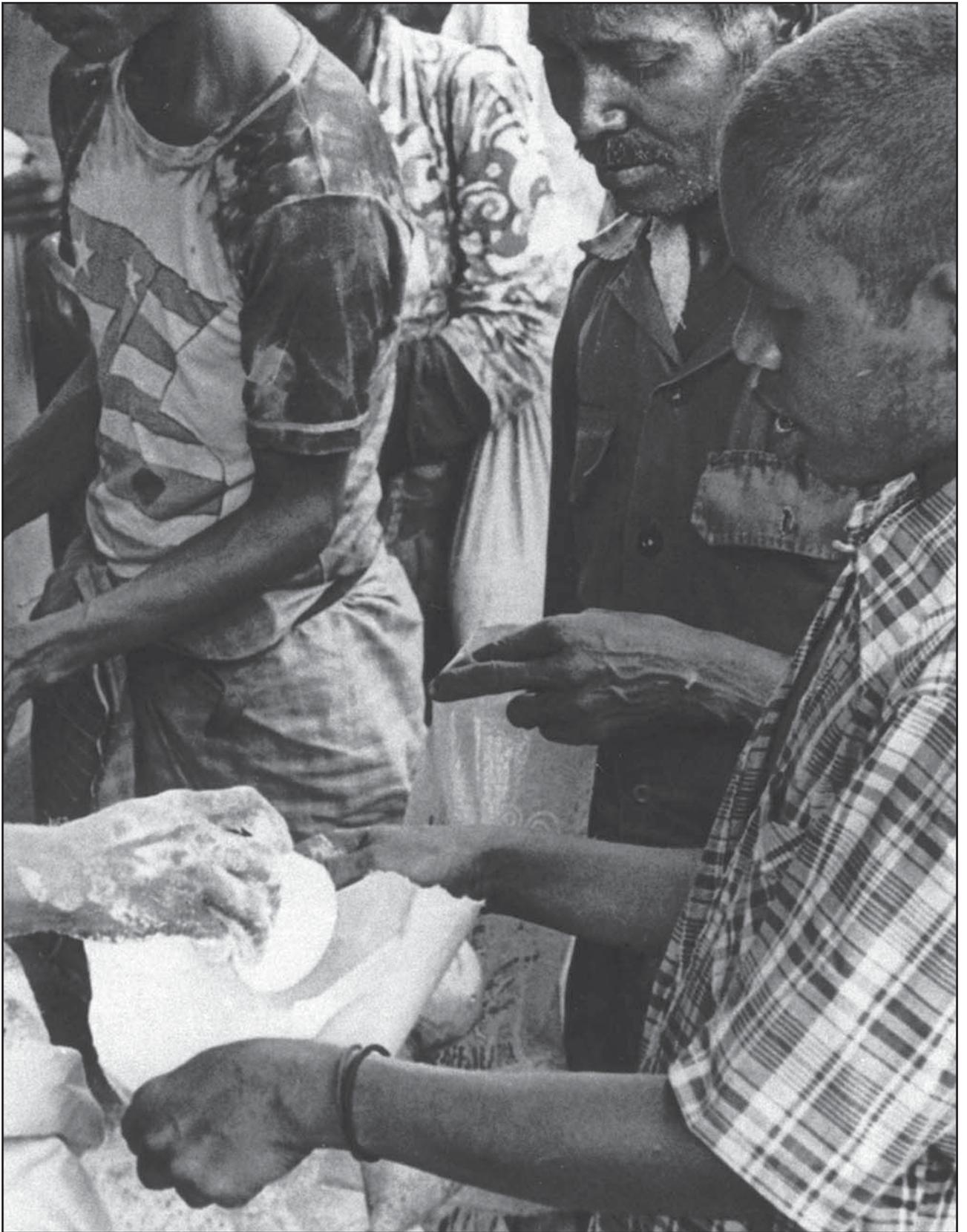
Ia juga mengingatkan tugas-tugas CAVR di dalam laporan terakhirnya,

“Dalam merumuskan laporan terakhirnya, CAVR akan berbicara dengan Indonesia, dan tentunya kami sangat sadar mengenai konflik yang sedang berlangsung di Aceh. Apa yang telah terjadi di Timor-Leste pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an tidak boleh terjadi di Aceh tahun 2003. Jika Indonesia mengikuti kode etik Palang Merah, maka akan sangat membantu.”

Bencana kelaparan ini adalah keadaan darurat yang rumit yang tergolong tingkatan tertinggi.

Bencana ini tidak hanya melibatkan nyawa manusia yang berharga tetapi juga kepentingan kekuasaan yang besar.

(halaman kosong)



Bantuan makanan didistribusikan di Hatolia kepada masyarakat yang kelaparan, akhir 1970an.

Petikan dari wawancara tahun 1980 di Portugal

Pastor Leoneto do Rego

Pastor Leoneto do Rego datang dari Angra do Heroismo di Portugal untuk mengabdikan sebagai misionaris di Dili pada tahun 1956. Pada saat itu ia berusia 41 tahun. Ia tinggal di Timor-Leste selama 23 tahun, termasuk tiga tahun di daerah yang dikuasai Fretilin pada tahun-tahun awal pendudukan Indonesia. Ia menjadi Kepala Misi dan Kepala Sekolah Sobaida, Manatuto yang terkenal. Meskipun Pastor Leoneto tidak bersaksi pada audiensi publik, transkripsi wawancara pada tahun 1980 yang ia berikan kepada Costa Alves dan Moreira Reis, yang diterbitkan dalam majalah Funu pada bulan Juli 1980, dibagikan. Berikut ini adalah petikan dari wawancara ini.



Pandangan Umum

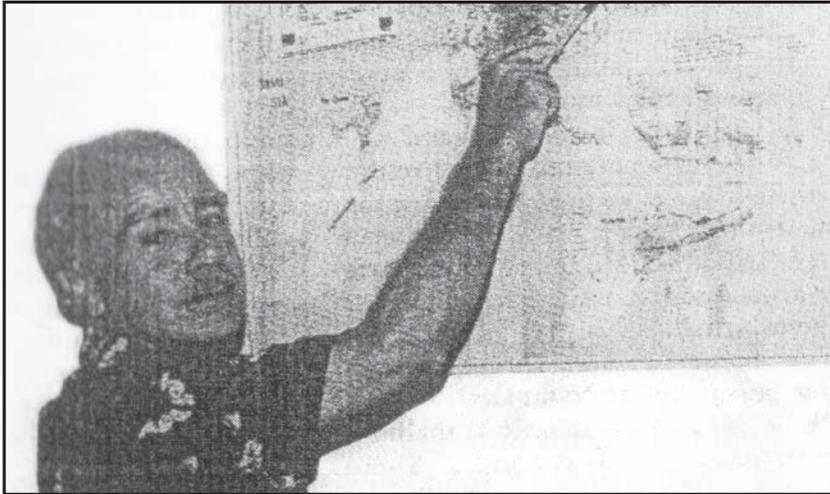
Pastor Leoneto menceritakan pengalamannya hidup di bagian timur pulau, di daerah pegunungan Soibada, Lacluta, dan Barique di distrik Manatuto di masa setelah invasi besar-besaran Indonesia bulan Desember 1975. Ia juga menceritakan pengalamannya saat berada di penjara militer Indonesia di Baucau setelah ia menyerah kepada Indonesia pada bulan Desember 1978 karena sakit. Ia juga mengenang masa ia tinggal di Dili sesudah ini, sebelum kembali ke tanah asalnya, Portugal.

Invasi militer Indonesia

Pastor Leoneto menceritakan bagaimana pada saat invasi ia berpikir untuk meninggalkan Timor-Leste, karena ia merasa usia dan kesehatannya menjadi suatu kelemahan. Menurutnya, ia telah mendiskusikan ini dengan Nicolau Lobato. Tetapi, Pastor Leoneto mengatakan bahwa ia mempertimbangkan kembali keputusannya, karena ia merasa akan timbul masalah bagi Fretilin kalau ia menyerah kepada tentara Indonesia, dan karena itu ia pun memutuskan untuk tinggal.

Setelah invasi Indonesia, Pastor Leoneto menceritakan bagaimana ia pindah ke Lacluta dan menetap di sana selama satu setengah tahun. Ia mengatakan bahwa selama masa tersebut, di daerah itu hanya ada sedikit indikasi bahwa perang sedang terjadi. Orang-orang bebas untuk mengolah tanah. Ia mengatakan bahwa masing-masing keluarga memiliki ladang yang mereka olah secara pribadi dan ada tanah komunal yang diolah oleh semua orang untuk keperluan angkatan bersenjata Fretilin. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang secara sukarela memilih mengolah tanah komunal dan menyokong tentara Fretilin dengan makanan.

Pastor Leoneto menceritakan inisiatif orang-orang yang tinggal di perkemahan di pegunungan untuk bertahan hidup. Ia mengatakan bahwa mereka mengorganisir jaringan rumah sakit-rumah sakit kecil, yang dipimpin oleh perawat dan petugas kesehatan. Ia mengisahkan, "Fretilin sangat pintar mendorong orang-orang yang mempunyai ketrampilan untuk membantu orang lain." Ia mengungkapkan bagaimana orang-orang muda yang pernah bekerja di laboratorium di Dili membangun laboratorium kecil untuk membuat obat-obatan. Menurutnya, mereka membuat obat-obatan yang efektif untuk mengobati malaria dan demam lainnya, diare, dan mengurangi efek TBC. Ia mengatakan bahwa obat malaria dibuat dari dua tipe pohon, 'quinina' dan 'ai-hanec'. Untuk mengatasi infeksi, dibuat alkohol dari getah pohon sagu. Ia menceritakan adanya "tradisi kuno mengenai pengetahuan tentang pohon-pohonan."



Disini, Pastor Leoneto do Rego menunjukan dimana ia tinggal bersama Fretilin selama tiga tahun setelah invasi Indonesia tahun 1975. (Foto dari Funu majalah, No. 1, Juli 1980.)

Akan tetapi, demikian Pastor Leoneto, rumah sakit-rumah sakit kecil ini tidak dapat mengatasi luka parah karena perang, karena tidak ada ahli bedah dan terlalu banyaknya kasus yang harus ditangani.

Pastor Leoneto mengatakan bahwa mereka mulai menghadapi kesulitan pada tahun 1978, ketika tentara Indonesia semakin mendekat dan operasi pengepungan mengharuskan penduduk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pastor Leoneto menceritakan bagaimana ia melarikan diri untuk menghindari pesawat perang dan bom sementara kesehatannya melemah, dan bagaimana ia hampir terkena bom.

“Ada sebuah operasi pengepungan besar, yang mengarahkan sasaran ke daerah saya dengan menggunakan tentara Indonesia yang tiba di pantai selatan, dan tiba-tiba ada banyak gerakan tentara di utara dan timur. Perkemahan Fretilin mulai melemah, dan waktu itulah banyak orang meninggalkan perkemahan, kebun, dan tanaman mereka... Perkemahan saya, Naroman (Terang) tidak lolos dari situasi ini. Saya dapat merasakan betapa dekatnya pertempuran berlangsung.”

Mengenai organisasi dan operasi militer, Pastor Leoneto bersaksi bahwa tentara Indonesia sangat lemah dan takut terhadap Fretilin. Kekuatan Indonesia terletak pada senjatanya. Sebaliknya, ia mencatat bahwa Fretilin siap mati untuk perjuangan namun kekurangan senjata yang baik. Banyak dari mereka menggunakan tombak dan panah. Ia menuturkan bahwa banyak tentara Indonesia yang mati dalam pertempuran, dengan perkiraan bahwa untuk setiap tentara Fretilin yang mati, dua atau tiga prajurit Indonesia terbunuh.

Pastor Leoneto bercerita mengenai bagaimana saat kesehatannya berkurang ia meminta izin dari pemimpin Fretilin Nicolau Lobato untuk menyerah kepada Indonesia dan berusaha kembali ke Portugal. Ia mengatakan menerima pesan lisan yang disampaikan kepadanya menyatakan persetujuan Lobato.

“Ia mengatakan bahwa saya punya hak tanpa syarat untuk pergi. Ia menerimanya sebagai keputusan yang baik dan mengharapkan agar saya sehat.”

Ia menyerah pada tanggal 31 Desember 1978. Ia mengisahkan bagaimana ia di markas tentara Indonesia mengetahui bahwa Nicolao Lobato telah dibunuh hari itu juga.

“Semua orang terlihat sedih. Itu wajar. Bukan hanya karena ia adalah seorang yang terpelajar, yang mewakili apa yang mereka inginkan. Tapi juga karena keterbukaan pikirannya. Ia sangat mudah diajak bicara dan sangat bijaksana. Kami telah menjadi teman dekat ...”

Ada sebuah operasi pengepungan besar, yang mengarahkan sasaran ke daerah saya dengan menggunakan tentara Indonesia yang tiba di pantai selatan, dan tiba-tiba ada banyak gerakan tentara di utara dan timur. Perkemahan Fretilin mulai melemah, dan waktu itulah banyak orang meninggalkan perkemahan

Father Leoneto do Rego

Fretilin sangat pintar mendorong orang-orang yang mempunyai ketrampilan untuk membantu orang lain...

Untuk mengatasi infeksi, dibuat alkohol dari getah pohon sagu.

Ia menceritakan adanya “tradisi kuno mengenai pengetahuan tentang pohon-pohonan.”

Pator Leoneto mengatakan bahwa ia dibawa dengan helikopter ke penjara Baucau, dimana “selama 17 hari saya diinterogasi dua kali sehari.” Ia tidak dipukuli namun ia dapat mendengar jeritan-jeritan para tahanan lain yang disiksa. Kemudian ia dibawa ke Dili.

Kehidupan di Dili

Ia berbicara tentang ketegangan hidup di Dili pada waktu itu. Tentang bagaimana Indonesia menjalankan sistem baru mereka, tentang bagaimana “di kantor-kantor setiap orang menggunakan penerjemah dan di sekolah hanya bahasa Indonesia yang diajarkan, yang tidak dimengerti oleh siapapun.” Ia mengatakan bahwa kegiatan kependuan nasional Indonesia dipaksakan kepada anak-anak. Ia bercerita mengenai persoalan ketika pekerja konstruksi Indonesia dibawa ke Timor-Leste.

Ia juga bercerita tentang perkosaan terhadap perempuan muda oleh tentara Indonesia dan mengenai pusat penyiksaan di toko Sang Tai Hoo yang diubah menjadi markas intelijen militer Indonesia, di Dili. Ia mengatakan bahwa ada sebuah ungkapan yang digunakan di Dili pada waktu ini, “mobil teman.” Ia bercerita bahwa orang-orang akan bergurau dengan mengatakan “awas, mobil teman akan datang untuk menjemputmu.” Dalam kenyataan, kata Pastor Leoneto, “‘mobil teman’ adalah suatu lembaga menakutkan yang akan berhenti di rumah-rumah orang pada malam hari untuk menjemput mereka.”

Pastor Leoneto mengatakan bahwa ia mengamati para anggota partai UDT dan Apodeti pada waktu itu merasa ditipu oleh Indonesia. Ia mengemukakan terutama apa yang ia anggap sebagai kerakusan Indonesia di Dili, yang ditunjukkan oleh penguasaan militer atas semua penjualan kopi.

Penutup

Ketika wawancara diberikan pada tahun 1980, berita-berita yang menyelip ke luar Timor pada waktu itu menyebutkan taktik gerilya baru yang digunakan Fretilin. Pastor Leoneto menyimpulkan bahwa ini tidak membuatnya terkejut dan meramalkan bahwa mereka akan berhasil dalam perjuangan ini.

Penutupan

Pidato Penutupan 29 Juli 2003

Dr. José Ramos-Horta, Menteri Luar Negeri dan Kerjasama RDTL

José Ramos-Horta lahir pada bulan Desember 1949. Setelah lulus dari Liceu di Dili ia bekerja sebagai wartawan di surat kabar A Voz de Timor dan salah seorang pendiri kelompok klandestin pada jaman kolonial tahun 1970. Ia diasingkan ke Mozambique akhir tahun itu karena mengkritik rezim Portugis. Ia kembali menjadi wartawan di Timor pada tahun 1972 dan berperan dalam pendirian ASDT, yang kemudian menjadi partai politik Fretilin. Ia mengunjungi Australia dan Indonesia untuk meminta dukungan bagi kemerdekaan Timor-Leste. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 28 November 1975, ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dan Informasi Luar Negeri dan ditugaskan keluar Timor pada awal bulan Desember untuk menginternasionalkan masalah Timor-Leste, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia menerima hadiah Nobel bersama dengan Uskup Belo pada tahun 1996. Pada tahun 2002 ia menjadi Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama pemerintah RDTL. Ia adalah penulis sebuah buku berjudul Funu: The Unfinished Saga of East Timor.

Pendahuluan



Sebelum saya menutup audiensi publik ini, pertama-tama saya ingin meminta maaf. Saya tidak bisa mengikuti kerja Komisi dari dekat. Hal ini karena jabatan saya sebagai Menteri Luar Negeri mengharuskan saya menghabiskan banyak waktu di luar negeri. Sebagai negara kecil kita harus selalu datang dan mengetuk pintu negara lain. Negara lain tidak datang dan mengetuk pintu kita. Colin Powel tidak datang ke Dili, mengetuk pintu saya dan minta saya untuk menjamunya. Jadi saya yang harus pergi ke Washington, London, Lisbon, Jakarta, Kuala Lumpur, Canberra, dan tempat lainnya untuk mengetuk pintu mereka dan meminta para pemimpin negara-negara tersebut untuk menemui saya. Saya sudah melakukan ini selama 24 tahun. Saya kira hal ini sudah berakhir tetapi kenyataannya saya harus tetap melakukannya karena banyak masalah di dunia ini. Jika kita tidak selalu mengunjungi negara-negara ini, mereka akan melupakan kita.

Karena alasan tersebut saya tidak bisa hadir kemarin dan hari ini untuk mendengarkan kesaksian saudara-saudari kita yang menjadi korban yang menanggung penderitaan selama 24 tahun baik secara fisik maupun melalui apa yang mereka saksikan. Saya ucapkan selamat kepada Komisi dan para Komisararis atas kerja yang mereka lakukan dengan penuh integritas, keadilan, dan objektivitas. Mereka mendengarkan dan mencatat apa yang mereka dengar seperti apa adanya, tanpa ada manipulasi politik. Saya juga menyampaikan selamat kepada Pat Walsh dan Patrick Burgess. Ketika saya mendengar bahwa mereka akan menjadi penasihat untuk Komisi saya merasa senang sekali. Kedua orang ini mempunyai kekuatan, integritas, dan pengabdian profesional. Mereka menyerahkan tubuh dan jiwa mereka untuk Timor-Leste. Jadi Komisi sangat beruntung bisa bekerja sama dengan kedua orang ini.

Bekerja di luar negeri selama masa pendudukan

Terima kasih banyak kepada masyarakat internasional, PBB, dan negara-negara yang memberikan dukungan kepada kerja Komisi. Saya tidak mempunyai pengalaman langsung di sini, karena bersama Dr. Mari Alkatiri dan Rogério Lobato, saya meninggalkan Timor-Leste pada 4 Desember 1975. Sebuah pesawat dari Australia membawa

kami ke Darwin dan Sydney. Kemudian masing-masing dari kami menjalankan tugas yang diberikan oleh Wakil Presiden (Perdana Menteri) Nicolau Lobato. Saya dikirim ke New York untuk mengunjungi PBB. Dr. Alkatiri pergi ke Moçambique untuk menggalang dukungan dari gerakan Non-Blok atau dari Dunia Ketiga. Dan Rogério Lobato menjalankan tugas yang menjadi bidangnya. Jadi karena itu, kami tidak mempunyai pengalaman dengan semua yang terjadi di Timor-Leste.

Informasi yang kami terima di luar negeri datang dari Fretilin dari sudut pandang perlawanan. Antara tahun 1975-1979 tidak ada selembar suratpun atau informasi apapun dari Timor-Leste. Kami mencari informasi dari sumber manapun, khususnya dari Gereja. Namun bahkan dengan Gereja, komunikasi tidak berjalan secara langsung. Pat Walsh yang menjadi penghubung. Baru setelah tahun 1983 saat Dom Martinho Lopes keluar karena Tuhan membuka jalan baginya untuk pergi ke luar negeri, kami bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Pada tahun 1981 gerakan perlawanan klandestin di Dili belum terorganisir dengan baik. Baru setelah gerakan perlawanan klandestin di Dili menjadi terorganisir dengan baik informasi mulai mengalir keluar dari negeri ini.

Saat kami memulai pekerjaan kami untuk perlawanan di front diplomatik, Perang Dingin sedang berlangsung. Uni Soviet belum jatuh, sehingga perjuangan dan penderitaan rakyat kita dilupakan oleh banyak pihak. Karena kita tidak mempunyai foto atau terutama rekaman video untuk dipertunjukkan sebagai bukti kepada orang luar, banyak orang yang tidak percaya. Musuh-musuh kita menyebut saya pembohong. Kalau bukan karena keberanian wartawan Max Stahl, yang merekam dalam film pembantaian Santa Cruz atau bila tidak ada foto atau gambar-gambar untuk mendukung apa yang saya katakan mengenai Santa Cruz, orang hanya akan berkata, "Ia pembohong." Untungnya, Tuhan mengirim Max Stahl ke Santa Cruz dimana dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan merekam kejadian itu dalam video, bukti yang orang tidak bisa membantahnya. Ini merupakan awal dari perubahan dalam kesadaran dunia dan meningkatkan kekuatan kerja diplomatik kita. Tetapi saya tidak berada disini untuk berbicara tentang sejarah diplomasi.

Saat kami memulai pekerjaan kami untuk perlawanan di front diplomatik, Perang Dingin sedang berlangsung.

Uni Soviet belum jatuh, sehingga perjuangan dan penderitaan rakyat kita dilupakan oleh banyak pihak.

Rekonsiliasi, keadilan, dan kebenaran

Karena saya tidak bisa berbicara mengenai tahun-tahun setelah tahun 1975 di sini, saya akan memberikan sedikit renungan mengenai persoalan rekonsiliasi, keadilan, dan kebenaran.

Tidak seorang Timor-Lestepun yang tidak kehilangan anggota keluarga selama masa pendudukan. Ada keluarga yang seluruh anggotanya terbunuh. Di dalam keluarga Lobato dulu ada 14 orang. Sekarang hanya Rogério yang hidup. Dari Nicolau Lobato sampai adik-adiknya – mereka semua mati. Di seluruh Timor-Leste banyak keluarga mengalami hal yang serupa.

Bulan September lalu saya sekeluarga pergi ke Lolotoe, Bobonaro. Apa tujuan kami ke sana? Untuk menggali kuburan adik perempuan saya Maria Gina. Dia meninggal pada 18 Desember 1978. Untungnya penduduk melihat kematiannya dan menguburkan mayatnya. Setelah 24 tahun kami bisa menemukan tulang-tulanginya dan membawa kembali ke Dili untuk dikuburkan.

Tetapi sampai sekarang kami tidak bisa menemukan dua saudara kami, apakah Nuno dan Guilherme dibunuh atau dimana kuburan mereka. Ini pengalaman yang dirasakan oleh banyak orang Timor-Leste. Saya tidak mengalami langsung karena saya tidak disini, tetapi melalui keluarga dan teman, saya tahu apa yang terjadi selama lebih dari 24 tahun.

Kalau kita merenungkan apa yang terjadi dengan rakyat kita di masa lalu kita akan berpikir mengenai keadilan. Apakah keadilan akan tercapai? Apakah pelaku kejahatan, yang membunuh, yang membawa senjata dan mengambil nyawa orang lain akan dihukum? Pandangan kami, pandangan Presiden, Pemerintah, dan pandangan pribadi saya adalah sebagai berikut: pertama-tama, Pemerintah memberikan dukungan kuat pada proses ini melalui CAVR, karena sebelum kita berpikir tentang keadilan kita harus berpikir tentang kebenaran. Kebenaran juga adalah sebuah tindakan keadilan. Setidak-tidaknya, masyarakat dunia bisa mendengar apa yang terjadi selama lebih dari 24 tahun.

Pemerintah juga menghargai integritas dan kemandirian Unit Kejahatan Berat yang didirikan UNTAET di Timor-Leste dan sekarang ini bekerja di Dili dan di semua distrik. Pemerintah memberikan dukungan dan menghormati wewenang yang dimiliki oleh anggota-anggota Unit Kejahatan Berat. Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mendirikan Pengadilan Ad Hoc di Jakarta, yang berjanji menegakkan keadilan. Pemerintah Indonesia tidak menginginkan pengadilan internasional dan karena itu mereka menawarkan pembentukan Pengadilan Ad Hoc di Indonesia. Kita tahu bahwa hingga sekarang keadilan belum tercapai karena Pengadilan Ad Hoc itu tidak memberikan keadilan yang sejati. Unit Kejahatan Berat menyerahkan banyak kasus mantan milisi yang mendapatkan hukuman 10, 20 atau 30 tahun penjara. Tetapi kepada mereka yang paling bertanggung jawab di Indonesia, Pengadilan Ad Hoc belum memberikan keadilan.

Dilema bagi Timor-Leste adalah sebagai berikut. Bila Pengadilan Ad Hoc tidak bisa diharapkan oleh rakyat Timor-Leste, maka rakyat Timor-Leste bisa mendesakkan dibentuknya pengadilan internasional. Pengadilan internasional seperti di Rwanda, dan bekas Yugoslavia yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam Dewan Keamanan PBB ada lima belas negara yang menjadi anggotanya. Sepuluh negara tidak mempunyai hak veto, mereka tidak mempunyai banyak wewenang. Hanya lima negara yang benar-benar kuat. Kelima negara inilah yang bisa menentukan apakah pengadilan internasional bisa dibentuk atau tidak. Untuk membentuk sebuah pengadilan maka paling tidak harus ada sembilan suara setuju dan tidak satu negara yang mempunyai hak veto yang menentangnya. Apabila salah satu dari kelima anggota tetap yang mempunyai hak veto menentang maka resolusi tidak bisa disahkan. Kita tidak tahu apakah kesepuluh negara anggota lainnya mempunyai kekuatan untuk menciptakan pengadilan internasional. Dan kita tidak tahu apakah kelima belas negara tersebut akan memberikan suara menyetujui atau menolak pembentukan pengadilan internasional.

Dan sekalipun Dewan Keamanan memilih untuk membentuk pengadilan internasional, ini tidak berarti bahwa pemerintah Timor-Leste akan mampu mencari dana untuk membiayai pengadilan internasional ini. Saya akan berikan contoh kecil. Masyarakat internasional belum memberikan semua uang yang dibutuhkan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hanya beberapa negara yang sudah memberikan bantuan dana padahal anggaran Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi itu kecil. Anggaran untuk pengadilan internasional jauh lebih besar.

Masyarakat internasional belum memberikan semua uang kepada PBB untuk merekrut 200 orang yang akan dipekerjakan pada pemerintah Timor-Leste. Menurut rencana PBB, sesuai dengan rencana UNMISSET ada 100 posisi yang dibayar Dewan Keamanan secara langsung dari uang Dewan Keamanan. Tetapi untuk 200 posisi lainnya bukan Dewan Keamanan yang membayar tetapi masing-masing negara donor yang memberi uang untuk perekrutan. Sampai sekarang sebagian besar dari 200 posisi itu belum dibiayai. Jika masyarakat internasional tidak mempunyai uang, tidak mampu, tidak mampu mendukung CAVR, tidak bisa mendukung 200 posisi, maka kita harus berpikir secara realistis apakah mereka bisa memberikan dana untuk pengadilan internasional. Saya kira tidak. Demikian juga, Indonesia sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama.

Jadi apa strategi pemerintah dalam hal melobi untuk dibentuknya pengadilan internasional? Kita harus membuat analisis yang baik mengenai hubungan kita dengan Indonesia. Kita juga harus memahami persoalan yang dihadapi Indonesia. Indonesia yang sekarang adalah Indonesia baru. Bukan lagi Indonesia pada zaman Soeharto. Mereka sedang berada dalam transisi dari kediktatoran. Demokrasi di Indonesia bukan seperti demokrasi yang kuat yang mempunyai akar yang dalam. Demokrasinya masih rapuh karena banyak masalah. Dan karena itu hubungan diplomatik kita dengan Indonesia juga baru.

Hubungan dengan Indonesia dan kepentingan nasional

Presiden Megawati menunjukkan ketegarannya dengan membuka hubungan diplomatik dengan kita. Ia datang merayakan hari kemerdekaan kita. Presiden kita menjunjunginya di Jakarta. Perdana Menteri kita pergi ke Jakarta beberapa bulan yang lalu untuk meningkatkan hubungan, untuk melangkah keluar dari masa lalu dan menatap masa depan. Karena itu kita punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kalau kita bersikukuh menginginkan pengadilan internasional kita bisa menghancurkan hubungan ini, dan ini juga akan menciptakan lebih banyak penderitaan bagi Presiden Megawati.

Jadi ketika membuat keputusan, Pemerintah harus mempertimbangkan secara hati-hati tindakan apa yang terbaik untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Keadilan memberi andil pada kepentingan nasional tetapi kita sadar bahwa kadang-kadang kita harus mengorbankan sebagian dari emosi kita karena ada hal lain yang lebih besar yang ingin kita capai. Hal yang lebih besar itu adalah kebebasan, kemerdekaan, perdamaian, dan stabilitas di Timor-Leste.

Saya akan memberi contoh dari Afrika Selatan. Selama lebih dari empat puluh tahun Afrika Selatan berada di bawah sistem Apartheid. Menurut definisi Majelis Umum PBB, Apartheid merupakan kejahatan terhadap umat manusia. Tetapi di Afrika Selatan mereka tidak mendirikan pengadilan internasional. Mereka membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi seperti kita. Mereka tidak memberinya nama Komisi Penerimaan, hanya Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Secara tegas menurut definisi Majelis Umum PBB, Apartheid merupakan kejahatan terhadap umat manusia, ini berarti mereka harus membentuk pengadilan internasional untuk mengadili semua orang yang terlibat dalam sistem Apartheid. Tetapi mereka tidak melakukannya. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional, perdamaian, dan stabilitas, mereka membentuk komisi untuk mengungkapkan kebenaran. Sejumlah orang diadili, tetapi di wilayah Afrika Selatan.

Di Timor-Leste kita tidak hanya membentuk satu komisi tetapi dua lembaga: CAVR dan Pengadilan Ad Hoc. Ini lebih dari yang dikerjakan di Afrika Selatan, dan beberapa anggota milisi sudah diajukan ke pengadilan. Inilah keadaannya. Saya hanyalah berkata jujur kepada semua orang, dengan seluruh masyarakat kalau saya mengatakan bahwa saya, sebagai Menteri Luar Negeri yang melakukan tugas diplomatik untuk Timor-Leste, tidak percaya bahwa kepentingan strategis terbaik Timor-Leste akan tercapai dengan melobi untuk diadakannya pengadilan internasional.

Kebebasan dan Hati Nurani

Tentu saja sebagai Menteri Luar Negeri saya tidak memberikan perintah. Yang lebih penting adalah apa yang dikatakan oleh Presiden. Setelah itu kata-kata Dewan Menteri dan setelah itu Parlemen. Tetapi pendapat saya sebagai Menteri Luar Negeri ialah, seperti yang baru saya katakan, pengadilan internasional bukan cara yang terbaik untuk memperjuangkan kepentingan Timor-Leste. Selama 24 tahun kami minta keadilan kepada dunia. Saat kita minta keadilan kepada dunia, menurut pemahaman saya, yang kita mint-

akan adalah kebebasan untuk Timor-Leste. Menurut pendapat saya, tidak ada keadilan yang lebih tinggi daripada kebebasan. Timor-Leste telah mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Inilah keadilan.

Bila Indonesia tidak bisa menegakkan keadilan, bila Indonesia tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan keadilan, bila masyarakat internasional tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan keadilan, mereka harus melihat ke hati nurani mereka sendiri, bercermin, dan bertanya pada diri sendiri apakah hati nurani mereka bersih atau tidak. Karena kita tidak punya masalah. Hati nurani kita bersih karena kita adalah korban dan kita menemukan keadilan melalui kebebasan. Bila orang-orang yang melakukan pembunuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, tidak mempunyai keberanian atau kekuatan untuk mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, maka mereka harus hidup menanggung beban ini selama Tuhan memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka akan hidup dengan beban tanggung jawab ini, bukan Timor-Leste.

Timor-Leste sudah bebas. Bebas untuk membangun sebuah negara baru, untuk menatap masa depan. Ini pemahaman saya tentang konsep keadilan. Tidak ada keadilan yang lebih besar dibandingkan kemerdekaan dan kebebasan Timor-Leste. Saya tahu tidak ada seorangpun yang bisa mengembalikan nyawa tiga saudara saya yang sudah meninggal. Saya tidak bisa menghidupkan mereka. Ini pengorbanan besar yang harus ditanggung seluruh rakyat Timor-Leste.

Selama 24 tahun dunia luar tidak mendengarkan kita. Saya bicara dari pengalaman pribadi. Dan rakyat Timor-Leste juga berbicara dari pengalaman pribadi. Tetapi pada akhirnya, dunia luar mendengar. Rakyat di berbagai penjuru dunia, bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat sipil di seluruh dunia mendengar, dan pemerintah di negara lain mendengar dan Dewan Keamanan mendengar. Akhirnya, setelah 24 tahun, mereka juga mengupayakan keadilan. Mereka bangkit dan menerima tanggung jawab mereka membantu kita mencapai kemerdekaan.

Jadi meski beberapa dari mereka membuat kesalahan mendukung invasi, mengabaikan masalah Timor-Leste, menutup mata, pada tahun 1999 hati nurani mereka tergugah dan bangkit membantu Timor-Leste mencapai kebebasan. Ini adalah suatu tindakan keadilan.

Bila kita bisa menghargai dan berterima kasih kepada negara-negara besar yang dulu pernah melupakan kita tetapi sekarang membantu kita, kita juga akan mempunyai kekuatan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Indonesia. Indonesia bukan hanya militer. Bukan pula tentara. Indonesia bukan hanya Kopassus atau Polri. Indonesia adalah negara besar dengan banyak penduduk yang telah mengalami penderitaan dan banyak orang Indonesia yang telah membantu kita.

Lebih banyak orang Indonesia yang telah menderita dan yang berhati baik dibandingkan sejumlah orang yang jahat. Dan karena itu kita mempunyai niat baik, kita mempunyai hubungan dengan rakyat Indonesia. Orang Indonesia yang jahat akan tetap tinggal di Indonesia, di tengah-tengah orang Indonesia yang baik. Indonesia harus waspada setiap hari untuk memperkuat demokrasi, keadilan, dan kebebasan.

Penutup

Ini yang ingin saya sampaikan. Seperti yang saya katakan, saya tidak berbicara sebagai korban langsung dan saya tidak bisa memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Saya baru saja mengatakan secara jujur dan terbuka mengenai pikiran-pikiran saya, tanpa ada motivasi politik apapun. Saya berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang saya pikir tidak bisa kita lakukan. Proses ini belum berakhir karena Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB masih melakukan evaluasi lagi. Dalam beberapa minggu, atau beberapa bulan mendatang, Sekretaris Jenderal PBB akan menyerahkan satu laporan kepada Dewan Keamanan. Laporan mengenai kerja Unit Kejahatan Berat dan mengenai Pengadilan Ad Hoc. Mereka masih melakukan evaluasi terhadap dua sistem tersebut, dua mekanisme tersebut, apakah membuahkan hasil atau tidak dan apakah ada pilihan lain.

Jadi keputusan terakhir ada di tangan Dewan Keamanan. Saya kira dalam dua atau tiga bulan kita akan mendengar pilihan-pilihan untuk mencapai keadilan dari Dewan Keamanan.

Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.



1979 Laga, arsip foto.

Daftar Istilah

ABRI	<i>Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</i>
ACFOA	<i>Australian Council for Overseas Aid</i>
Aditla	<i>Associação Democrática para a Integração de Timor Leste na Austrália</i>
Apodeti	<i>Associação Popular Democrática Timorese</i>
ASDT	<i>Associação Social Democrática Timorese</i>
CNRT	<i>Conselho Nacional de Resistência Timorese</i>
CRS	<i>Catholic Relief Services</i>
Falintil	<i>Forças Armada de Libertação Nacional de Timor Leste</i>
Fretilin	<i>Frente Revolucionária de Timor Leste Independente</i>
Hansip	<i>Pertahanan Sipil</i>
ICRC	<i>International Committee of the Red Cross</i>
Kasi I	<i>Kepala Seksi Intelijen</i>
Kodim	<i>Komando Distrik Militer</i>
Koramil	<i>Komando Rayon Militer</i>
KOTA	<i>Klibur Oan Timor Aswain</i>
Kotis	<i>Komando Taktis</i>
Linud	<i>Lintas Udara</i>
Mahidi	<i>Mati Hidup Demi Integrasi</i>
OPJT	<i>Organização Popular Juventude de Timor</i>
OPMT	<i>Organização Popular de Mulher Timor</i>
OV-10	<i>OV-10A Bronco</i>
Pemda	<i>Pemerintah Daerah (Tingkat I / II)</i>
SGI	<i>Satuan Gabungan Intelijen</i>
TBO	<i>Tenaga Bantuan Operasi</i>
TNI	<i>Tentara Nasional Indonesia</i>
UDT	<i>União Democrática Timorese</i>
Unetim	<i>União Nacional dos Estudantes de Timor</i>

